



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 - 2021





Kata Pengantar

Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharuskan menyusun RENSTRA dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menindak lanjuti amanat tersebut, Dinas Perdagangan Kota Samarinda menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 guna mendukung daya saing ekonomi bangsa disektor perdagangan.

Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah khususnya di sektor perdagangan sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian Misi Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 yaitu untuk **"MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN"** maka akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra ini diharapkan akan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh stakeholder hingga selesainya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 ini diucapkan banyak terima kasih.

Samarinda, 2018
Kepala

H. Adriyani, SE, MM
NIP. 19650330 199103 1 006



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda..... 12
Gambar 2.2	Perkembangan Lifting Minyak Bumi Kota Samarinda Tahun 2009 -2014..... 63
Gambar 2.3	Perkembangan Lifting Gas Bumi Kota Samarinda Tahun 2009 -2014 64



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Gambaran Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS / Honorer.....	41
Tabel 2.2	Data PNS berdasarkan pendidikan	43
Tabel 2.3	Data Non PNS berdasarkan pendidikan	44
Tabel 2.4	Data Non PNS berdasarkan jabatan	45
Tabel 2.5	Kondisi sarana kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016	46
Tabel 2.6	Sarana prasarana Tahun 2016.....	47
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Retribusi Pasar	48
Tabel 2.8	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Samarinda Tahun2016	49
Tabel 2.9	Nilai PDRB Sektor perdagangan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha.....	50
Tabel 2.10	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	51
Tabel 2.11	Jumlah pasar modern, tradisional dan SPBU di Kota Samarinda	52
Tabel 2.12	Perkembangan penertiban SIUP baru di Kota Samarinda Tahun 201 – 2015	53
Tabel 2.13	Perkembangan penertiban TDP Kota Samarinda Tahun 2010 – 2015	54
Tabel 2.14	Realisasi Ekspor komoditi utama Kota Samarinda Tahun 2011 – 2013	55
Tabel 2.15	Jumlah Komoditi ekspor kota Samarinda tahun 2010 – 2014	56
Tabel 2.16	Perkembangan nilai ekspor, impor migas dan non migas kota samarinda tahun 2010 - 2014	56
Tabel 2.17	Jumlah tera ulang alat ukur menurut jenisnya di kota samarinda tahun 2010 – 2015.....	57
Tabel 2.18	Perkembangan laju inflasi / deflasi menurut kelompok komoditi di Kota Samarinda tahun 2011 – 2015	58
Tabel 2.19	Perkembangan rata – rata harga bahan pokok menurut jenisnya kota Samarinda	59
Tabel 2.20	Jumlah stok akhir bahan pokok dan barang strategis kota samarinda	60
Tabel 2.21	Pasar yang dikelola pemerintah kota samarinda	61
Tabel 2.22	Pasar yang dikelola swasta	62
Tabel 2.23	Perkembangan lifting minyak bumi kota Samarinda tahun 2009 – 2014	63
Tabel 2.24	Perkembangan lifting gas bumi kota samarinda tahun 2009 – 2014	64
Tabel 2.25	Data PKL dan potensinya diwilayah pasar Kota Samarinda sampai dengan tahun 2015	65
Tabel 2.26	Data izin usaha ketenagalistrikan di samarinda sampai dengan tahun 2014 berdasarkan pembangkit	66
Tabel 2.27	Data izin usaha ketenagalistrikan di samarinda sampai dengan tahun 2014 berdasarkan pembangunan.....	66
Tabel 2.28	Data capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda Bidang Perdagangan Tahun 2010 – 2015	67
Tabel 2.29	Data Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda Bidang Perdagangan Tahun 2010 – 2015	72
Tabel 3.1	Nilai skala kriteria berdasarkan isu – isu strategis	98
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas perdagangan kota samarinda tahun 2016 - 2021.....	103

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016 -2021



Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	105
Tabel 6.1	Rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021	112
Tabel 7.1	Indikator kinerja Dinas perdagangan kota samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota samarinda	124
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama IKU	125



LAMPIRAN

- Matrik RENSTRA Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021
- Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021
- Indikator Program Untuk RPJMD Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2016 - 2021



BAB 1 | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis atau Renstra adalah suatu dokumen yang disusun sebagai pedoman dan digunakan selama 5 tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (pada khususnya) dan pembangunan daerah (pada umumnya). Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, mengenai permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta menentukan program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan industri dan perdagangan.



Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kota Samarinda. Dinas Perdagangan kota Samarinda bertanggung jawab dalam PDRB Kota Samarinda yaitu kontribusi sektor perdagangan. Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda disusun melalui penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan yang ada, utamanya dengan RPJMD Kota Samarinda yang menempatkan perdagangan sebagai salah satu sektor yang berpengaruh dalam perekonomian di Kota Samarinda.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan



jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

14. Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 048 Tahun 2016, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda ;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
18. Keputusan Walikota Nomor 130-05/117/HK-KS/II/2018 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas perdagangan Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021;



2. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Perdagangan di Kota Samarinda dan
3. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Indikator Kinerja, Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA OPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA OPD) Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi /kabupaten / kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.



1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat



Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.



3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan .

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategi.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui



Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

2.1 Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah adapun turunannya ialah Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan kewenangan konkruen daerah kota samarinda dan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta dijabarkan melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a) Dinas.
- b) Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 2. Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis; dan
 3. Seksi Bina Usaha Perdagangan.
- d) Bidang Sarana Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.



- e) Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev, dan Iklim Usaha:
 - 1. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 3. Seksi Iklim Usaha dan ESDM.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g) Unit Pelaksana Teknis.

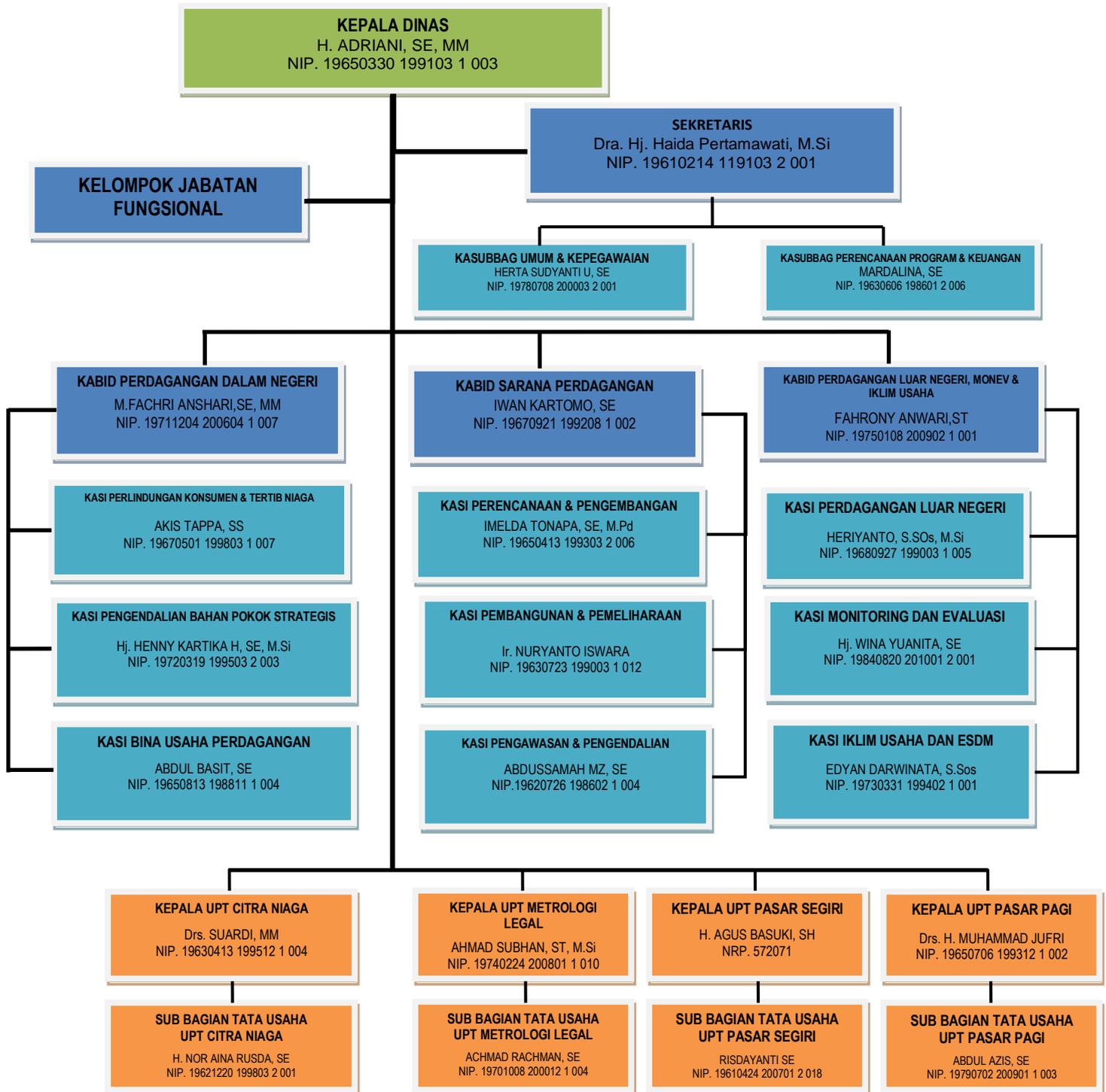
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perdagangan Kota Samarinda dibantu oleh aparatur. Struktur Dinas Perdagangan Kota Samarinda terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 3 (Tiga) Bidang dimana setiap Bidanganya mempunyai 3 (tiga) Seksi, 4 (empat) Unit Pelayanan Teknis digambarkan pada bagan struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 2.1

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA TUGAS FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda





2.2 *Gambaran Tugas dan Fungsi*

A. **Tugas Pokok Dinas Perdagangan Kota Samarinda**

1. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. **Fungsi Dinas Perdagangan Kota Samarinda**

Setelah tugas pokok, berikut ini adalah fungsi Dinas perdagangan Kota Samarinda:

1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perdagangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perdagangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perdagangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perdagangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas;
7. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. **Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Samarinda**

a) **Tugas Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan



2. Dinas Perdagangan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
3. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
4. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris

b) Fungsi Sekretariat

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);



- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
 - m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
 - n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
 - p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - a. mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - b. menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - c. menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang - bidang pada Dinas;
 - f. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan



- dokumen dinas;
- g. mengoordinir pengumpulan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan;
 - h. menyusun laporan tahunan Dinas;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - l. mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;
 - m. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
 - n. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
 - o. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - p. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian atas penerimaan retribusi ;
 - q. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - r. menyusun neraca Dinas;
 - s. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
 - t. menyusun laporan keuangan Dinas
 - u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - f. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - j. menyeleggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai
 - k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
 - m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - n. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;



- o. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- p. memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- r. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Dinas Perdagangan Kota Samarinda

a) Tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri

- 1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perdagangan dalam negeri.
- 2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.



b) Fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan dalam negeri;
3. pengendalian dan pengawasan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
4. penyusunan regulasi dan tatalaksana penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
5. pembinaan NSPK terkait Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
6. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
7. pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
8. pengendalian dan pengawasan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
9. pengaturan regulasi dan tata laksanakan proses penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;



10. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba
11. lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
12. pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
13. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
14. melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;
15. rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
16. pengkoordinasian keterjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;
17. pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
18. perumusan kebijakan tata kelola metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
19. pelaksanaan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran promosi, fasilitasi dan kerjasama kemitraanpelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan;



20. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 21. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 22. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
1. Tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - e. melakukan sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
 - f. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
 - g. melaksanakan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah;
 - h. melakukan pendataan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - i. melakukan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;
 - j. melakukan sosialisasi kebijakan barang beredar dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta



- penegakan hukum skala Daerah;
- k. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala Daerah;
 - l. menyelenggarakan, melaporkan dan merekomendasikan atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah;
 - m. melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual;
 - n. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta pendaftaran pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPK-SM);
 - o. menyelenggarakan pemberian pelayanan informasi dan pengawasan terkait SNI (Standart Nasional Indonesia);
 - p. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kemetrolgian;
 - r. melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tera dan tera ulang;
 - s. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan kemetrolgian;
 - t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi;
 - u. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - v. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;



dan

- w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengendalian bahan pokok strategis;
- c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. menganalisis bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. menyiapkan rekomendasi pemecahan masalah terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. menganalisis masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi dengan instansi terkait;



- j. melakukan analisa dan evaluasi dan perbaikan konsep pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi;
 - k. menyelenggarakan kegiatan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
 - l. menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kota;
 - m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Seksi Bina Usaha Perdagangan
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang data perdagangan;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - e. mengoordinir penyusunan dan sosialisasi standar



- operasional prosedur untuk penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- f. menyelenggarakan sosialisasi Norma Standar Prosedural dan Kriteria (NSPK) terkait penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - g. mengkoordinir penyelenggaraan program bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pendaftaran perusahaan;
 - h. memverifikasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - i. menyelenggarakan tata kelola administrasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - j. mengkoordinir penyusunan dan sosialisasi standar operasional prosedur tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - k. menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
 - l. mengkoordinir penyusunan dan sosialisasi standard operasional prosedur bagi layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1). penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2). penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3). penerima waralaba;



- m. menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- n. mengkoordinir penyusunan sosialisasi standar operasional prosedur bagi layanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- o. menyiapkan bahan/melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;
- p. menyelenggarakan tata kelola administrasi rekomendasi dan/ penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- q. memverifikasi dan memberikan rekomendasi dan/ penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA));
- r. melaksanakan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran, promosi dan kerjasama kemitraan;
- s. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c) Tugas Bidang Sarana Perdagangan
 - 1) Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perdagangan.
 - 2) Bidang Sarana Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - 3) Bidang Sarana Perdagangan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

- d) Fungsi Bidang Sarana Perdagangan
 - 1) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 2) perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan;
 - 3) pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sarana perdagangan rakyat, potensi pasar rakyat dan sarana perdagangan induk;
 - 4) perencanaan penataan dan penyiapan sarana lokasi pedagang informal yang terlokalisasi;
 - 5) pelaksanaan pembinaan dan penataan pasar tumbuh, pedagang informal yang terlokalisasi;
 - 6) perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
 - 7) pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring pemanfaatan sarana perdagangan;
 - 8) pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap



- pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat baik sarana perdagangan rakyat dan pasar modern;
- 9) penerbitan, pengawasan dan pengendalian tata kelola administrasi penyewaan tempat berjualan pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - 10) pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana, kebersihan, ketentraman dan ketertiban pasar rakyat maupun pasar modern;
 - 11) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT Dinas pengelola pasar rakyat maupun pasar modern yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - 12) pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 13) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan pengembangan sarana perdagangan;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan manajemen pengelolaan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;



- e. menyusun analisa pengembangan potensi pasar rakyat, tipologi pasar rakyat, model pengembangan dan tatalaksana pengelolaan pasar milik Pemerintah Kota;
- f. menyusun juknis tatakelola pemungutan dan penagihan retribusi pasar;
- g. melaksanakan evaluasi penerimaan retribusi pelayanan pasar rakyat dan pembinaan teknis penagihan;
- h. menyusun analisa/ kajian rencana penataan kawasan pasar rakyat, baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun yang dikelola oleh swasta/perorangan;
- i. menyusun analisa dan perencanaan penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan sarana perdagangan skala kota;
- j. menyusun rencana induk penataan sarana perdagangan untuk pedagang informal;
- k. menyusun analisa penetapan target dan evaluasi realisasi terhadap retribusi sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota, perorangan, swasta dan pedagang informal;
- l. menyelenggarakan tata kelola administrasi penyewaan sarana perdagangan dalam bentuk petak/ kios/ los lapak maupun area komersial pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta terhadap kondisi objektif sarana perdagangan;
 - i. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan pasar;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun swasta/perorangan;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap pemanfaatan petak/ kios/ petak/lapak dan area komersial yang merupakan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kewanamanan sarana perdagangan dan lingkungan sekitarnya termasuk fasilitas yang



- berada dalam area pasar milik Pemerintah Kota;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kebersihan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di lingkungan sarana perdangan pada UPT Pengelola Pasar;
 - i. melakukan pembinaan kepada UPT Pengelola pasar terkait teknis pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan sarana perdagangan;
 - j. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan menginventarisir permasalahan dan kondisi sarana dan utilitas pada sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;
 - k. mengkoordinasikan penanganan permasalahan sarana dan utilitas sarana perdagangan;
 - l. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha
3. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan,



- pemberian bimbingan di bidang pengawasan perdagangan.
4. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 5. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang
- a) Fungsi Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengawasan perdagangan meliputi perdagangan luar;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang pengawasan perdagangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan perdagangan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;
 - f. penyiapan pemantapan program di bidang pengawasan perdagangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;
 - h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan



- kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perdagangan luar negeri;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dibidang ekspor kepada eksportir dan calon eksportir;
 - e. melaksanakan pengaturan teknis informasi ekspor dan penerbitan dokumen ekspor/Surat Keterangan Asal (SKA) serta penelusuran asal barang;
 - f. merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota)
 - g. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi di bidang import kepada importir dan calon importir;
 - h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perdagangan impor;
 - i. melaksanakan pengolahan dan analisi data perdagangan impor;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan perdagangan import;
 - k. melaksanakan peraturan teknis dan pelayanan umum informasi perdagangan impor dan dokumen impor;
 - l. melaksanakan kegiatan administrasi dan pelayanan saran pertimbangan teknis Angka Pengenal Impor (API), Pengakuan importir terdaftar, dan bidang



- impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan penyajian informasi perdagangan impor Daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
 - n. melakukan pengawasan penerapan standar mutu perdagangan barang import;
 - o. mengkoordinir penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang eksport- import;
 - p. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi untuk kegiatan promosi dan kerjasama ekport-import;
 - q. merencanakan dan mengkoordinir penyelenggaraan pelatihan bagi para calon eksportir;
 - r. melaksanakan identifikasi produk unggulan kualitas eksport laik promosi dan kerjasama;
 - s. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;



- d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- e. mengoordinasikan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar;
- f. mengoordinasikan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kota dalam pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- h. menyusun dan menyajikan informasi usaha sektor perdagangan baik kepada pimpinan maupun instansi lain;
- i. melaksanakan evaluasi dan penyampaian perkembangan sektor usaha perdagangan kepada pimpinan;
- j. melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan evaluasi laporan berkala baik yang berasal dari bagian maupun sub dinas sebagai bahan data penyusunan kebijakan pimpinan;
- k. melaksanakan koordinasi pencatatan izin usaha perdagangan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan maupun informasi kepada pihak lain yang membutuhkan;
- l. melaksanakan evaluasi program/proyek pembangunan di lingkungan dinas perdagangan;
- m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;



- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Seksi Iklim Usaha dan ESDM
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang iklim usaha dan ESDM;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. mengoordinir dan merencanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional maupun internasional bagi produk ekspor unggulan;
 - e. mengoordinir dan merencanakan pelaksanaan pameran dan misi dagang lokal bagi produk ekspor unggulan;
 - f. mengoordinir pelaksanaan pemberian informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain;
 - g. menganalisis informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain;
 - h. mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota);
 - i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan



- unsur lingkup dinas, swasta, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengembangan dan pengawasan iklim usaha perdagangan;
- j. melaksanakan penyuluhan dan pemantauan terhadap iklim usaha perdagangan;
 - k. melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dunia perdagangan;
 - l. Pelaksanaan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
 - m. Pemberian rekomendasi permohonan penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas;
 - n. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga BBM/non BBM dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir;
 - o. Pembuatan rekomendasi permohonan lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;
 - p. Pemrosesan permohonan izin lokasi pendirian dan perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar, izin Penyaluran Minyak Pelumas Bekas (MPB), izin pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di Daerah operasi daratan dan di Daerah operasi pada wilayah 1/3 dari kewenangan provinsi, dan izin Pendirian Depot Lokal.
 - q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 dan Lindung Lingkungan di sektor migas;
 - r. Pengusulan pengadaan peralatan dan sarana guna menunjang kelancaran tugas di sektor migas;



- s. Pembantuan proses pengusulan dalam rangka penetapan peraturan di bidang migas;
- t. Pemberian persetujuan Surat Keterangan Terdaftar untuk Perusahaan Jasa Penunjang sektor migas;
- u. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Unit Pelayanan Teknis

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:



- a. Unit Pelaksana Teknis kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.



2.3 Sumber Daya SKPD

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Perdagangan Kota Samarinda sampai dengan akhir Desember tahun 2016 memiliki pegawai sebanyak 403 orang terdiri dari 130 Pegawai Negeri Sipil dan 273 Honorer PTTB dan PTTH, sebagai pelaksana kegiatan SKPD sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

GAMBARAN JUMLAH PEGAWAI PNS DAN NON PNS

No	Nama Bidang / Unit	JABATAN / ESSELON											
		II		III		IV		Pelaksana		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	1	-	-	1	-	2	8	5	3	3	12	11
2.	PDN	-	-	1	-	2	1	5	3	1	3	9	7
3.	Sarana Perdagangan	-	-	1	-	2	1	6	3	2	4	11	8
4.	PLN, Monev & Iklim Usaha	-	-	1	-	3	-	3	4	1	-	8	4
5.	UPTD Metrologi	-	-	-	-	1	1	8	4	16	3	25	8
6.	UPTD Pasar Pagi	-	-	-	-	1	1	7	-	35	7	43	8
7.	UPTD Pasar Segiri	-	-	-	-	1	1	4	2	57	4	62	7
8.	UPTD Citra Niaga	-	-	-	-	1	1	-	1	17	17	18	19
9.	Unit Pasar Bengkuring	-	-	-	-	-	-	3	-	5	2	8	2
10.	Unit Pasar Sei Dama	-	-	-	-	-	-	8	2	11	6	19	8
11.	Unit Pasar Ijabah	-	-	-	-	-	-	2	1	8	3	10	4
12.	Unit Pasar Kedondong	-	-	-	-	-	-	4	1	18	4	22	5
13.	Unit Pasar Palaran	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	3
14.	Unit Pasar Lok Bahu	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2
15.	Unit Pasar Kemuning	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	2
16.	Unit Pasar Baqa	-	-	-	-	-	-	10	1	16	6	26	7
17.	Unit Pasar Merdeka	-	-	-	-	-	-	3	-	8	2	11	2
Total		1	0	3	1	11	8	76	29	204	69	296	107



Dalam tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai pada tahun 2016 Pegawai Negri Sipil Dinas Perdagangan Kota Samarinda terdiri dari 91 Orang Laki - Laki dan 38 Orang Perempuan sedangkan Pegawai Non PNS terdiri dari 204 orang Laki - Laki dan 69 orang Perempuan, Pada pegawai Non PNS dilingkup Dinas Perdagangan terdiri dari berbagai jabatan (Administrasi, Kebersihan Pasar, Wakar dan Kamtib).

Jumlah pegawai ini akan terus bertambah seiring bertambahnya pasar yang dikelola serta diikuti dengan bertambahnya PAD Kota Samarinda dari Retribusi Pasar .



Tabel 2.2
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PENDIDIKAN

BIDANG / BAGIAN	PENDIDIKAN / JENIS KELAMIN													
	SD		SMP		SLTA		D3		S1		S2		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SEKRETARIAT	-	-	-	-	7	3	-	1	1	2	1	2	9	8
PERDAGANGAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	3	-	-	1	4	2	1	1	8	4
SARANA PERDAGANGAN	-	-	-	-	4	1	-	-	3	2	2	1	9	4
PLN, MONEV DAN IKLIM USAHA	-	-	-	-	-	2	-	-	6	2	1	-	7	4
UPTD METROLOGI	-	-	-	-	5	-	1	2	3	1	1	1	10	4
UPTD PASAR PAGI	2	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	1	8	1
UPTD PASAR SEGIRI	-	-	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	6	2
UPTD CITRA NIAGA	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	1
PASAR BENGKURING	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1
PASAR SEI DAMA	2	-	-	1	5	1	-	-	1	-	-	-	8	2
PASAR IJABAH	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1
PASAR KEDONDONG	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4	1
PASAR PALARAN	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1
PASAR LOK BAHU	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0
PASAR KEMUNING	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1
PASAR MERDEKA	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	0
PASAR BAQA	2	-	1	-	6	1	1	-	-	-	-	-	10	1
JUMLAH	7	0	1	1	50	16	2	4	27	9	6	6	93	36

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat masih terdapat Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan yang berpendidikan hanya Sekolah Dasar sebanyak 7 Orang, dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 Orang, sedangkan untuk SMA sederajat berjumlah 66 orang terdiri dari 50 orang Laki - Laki dan 16 Orang Perempuan.



Tabel 2.3
DATA PEGAWAI NON PNS
BERDASARKAN PENDIDIKAN

BIDANG / BAGIAN	PENDIDIKAN / JENIS KELAMIN											
	SD		SMP		SLTA		D3		S1		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SEKRETARIAT	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	3	3
PERDAGANGAN DALAM NEGERI	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3
SARANA PERDAGANGAN	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	2	4
PLN, MONEV DAN IKLIM USAHA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
UPTD METROLOGI	1	-	2	1	9	2	1	-	3	-	16	3
UPTD PASAR PAGI	10	1	2	2	20	2	1	-	2	2	35	7
UPTD PASAR SEGIRI	29	-	16	-	11	4	-	-	1	-	57	4
UPTD CITRA NIAGA	1	1	6	3	10	10	-	-	-	3	17	17
PASAR BENGKURING	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-	5	2
PASAR SEI DAMA	6	-	1	-	3	3	-	-	1	3	11	6
PASAR IJABAH	8	-	-	-	-	2	-	-	-	1	8	3
PASAR KEDONDONG	9	-	1	-	6	4	1	-	1	-	18	4
PASAR PALARAN	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2
PASAR LOK BAHU	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	2
PASAR KEMUNING	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	1
PASAR MERDEKA	5	-	4	1	7	3	-	1	-	1	16	6
PASAR BAQA	4	-	1	-	2	1	1	1	-	-	8	2
JUMLAH	76	2	35	8	78	42	4	2	13	15	204	69

Dari tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan dari sekitar 273 Pegawai Non PNS Di lingkungan Dinas Perdagangan Kota samarinda terdapat 78 Orang yang berpendidikan Sekolah dasar / sederajat, 43 orang berpendidikan SMP Sederajat, 120 Orang berpendidikan SMA Sederajat, 6 Orang berpendidikan DIII dan 28 Orang berpendidikan Sarjana (S1).



Tabel 2.4
DATA PEGAWAI NON PNS
BERDASARKAN JABATAN

BIDANG / BAGIAN	JABATAN / JENIS KELAMIN												
	ADMNISTRASI		SOPIR		KEBERSIHAN		WAKAR		KAMTIB		JUMLAH		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SEKRETARIAT	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
SARANA PERDAGANGAN	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
PLN, MONEV DAN IKLIM USAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0
UPTD METROLOGI	13	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	16	3
UPTD PASAR PAGI	6	5	-	-	26	2	2	-	1	-	-	35	7
UPTD PASAR SEGIRI	5	4	5	-	37	-	2	-	8	-	-	57	4
	13	12	-	-	4	5	-	-	-	-	-	17	17
PASAR BENGKURUNG	1	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-	5	2
PASAR SEI DAMA	2	6	-	-	8	-	1	-	-	-	-	11	6
PASAR IJABAH	-	3	-	-	5	-	1	-	2	-	-	8	3
PASAR KEDONDONG	4	4	-	-	8	-	4	-	2	-	-	18	4
PASAR PALARAN	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2
PASAR LOK BAHU	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2
PASAR KEMUNING	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3	1
PASAR MERDEKA	2	5	-	-	10	1	2	-	2	-	-	16	6
PASAR BAQA	1	2	-	-	5	-	1	-	1	-	-	8	2
JUMLAH	52	60	6	0	109	9	20	0	20	0	204	69	

Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan dari sekitar 273 Pegawai Non PNS Di lingkungan Dinas Perdagangan Kota samarinda terdapat 118 orang tenaga kebersihan di pasar dan gedung UPT, 112 orang tenaga Administrasi, 6 orang tenaga sopir, 20 orang tenaga wakar dan 20 orang tenaga kamtib pasar.



B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda tertera pada tabel 2.11 dan tabel 2.12 berikut

Tabel 2.5

Kondisi Sarana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016

No.	Sarana / Prasarana Kerja	Jumlah 2018	Kondisi (Baik / Rusak)	Jumlah Yang Diinginkan Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kendaraan Roda 4	18		20
3.	Kendaraan Roda 2	36	2 (Kurang Baik)	40
4.	Kursi Kantor	96	22 (Rusak Berat), 1 (Rusak Ringan)	250
5.	Meja	110	45 (Rusak Berat, 5 (Rusak Ringan)	200
6.	Lemari	64	10 (Rusak Berat)	70
7.	Filling Kabinet	27	11 (Rusak Berat), 1 (Rusak Ringan)	35
8.	AC	10	3 (Rusak Berat)	50
9.	Laptop	52	7 (Rusak Berat)	55
10.	Komputer	48	1(Kurang Baik), 8(Rusak)	50
11.	TV	11	2 (Rusak)	15
12.	Dispenser	6	1 (Kurang Baik), 2 (Rusak Berat)	10
13.	Peralatan Komputer Lainnya	15	7 (Rusak Berat)	50
14.	Mesin Ketik	14	2 (Rusak Berat)	15
15.	Timbangan	7	Baik	10
16.	Print	73	14 (Rusak Berat), 1 (Kurang Baik)	150
17.	Kipas	10	8 (Rusak Berat)	20
18.	Jam Mekanis	7	5 (Rusak Berat)	15

1. Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda



Tabel 2.6

Sarana Prasarana Tahun 2016

No.	Uraian	Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan	7.155 M2	APBD	Gedung Bersama
2.	Mobilitas	Pemeliharaan	R 4 = 16 unit R2 = 24 unit	APBD	
3.	Peralatan	Pemeliharaan	70 = unit	APBD	
4.	Lain - lain	Pemeliharaan	Ac = 50 unit	APBD	



2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perdagangan Kota Samarinda telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pelayanan publik dan pemberdayaan yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan hasil dan dampak terhadap capaian kinerja sektor perdagangan secara positif. Gambaran kinerja Dinas Perdagangan selama lima tahun antara lain.

Tabel 2.7

**TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2012	Rp 3.280.000.000	Rp 3.202.620.000	97,64%
2	2013	Rp 3.250.000.000	Rp 3.491.829.000	107,44%
3	2014	Rp 3.684.549.000	Rp 3.772.338.000	102,38%
4	2015	Rp 3.800.000.000	Rp 3.781.029.000	99,50%
5	2016	Rp 3.840.000.000	Rp 3.939.962.300	102,60%
6	2017	Rp 4.880.000.000	Rp 5.253.578.480	107,66%

Melihat tabel 2.7 diatas dapat dilihat Realisasi Pendapatan melalui retribusi pasar tiga tahun berturut yaitu pada tahun 2012 tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2013 dan 2014 barulah realisasi retribusi dapat mencapai bahkan melebihi target, kemudian kembali tidak memenuhi target kembali di tahun 2015, pada tahun 2016 dan 2017 kembali realisasi retribusi melebihi target yang diperoleh dari Retribusi Pasar , Parkir khusus Dalam Area Pasar dan Pelayanan Metrologi. Dinas perdagangan Kota Samarinda harus mempunyai



inovasi dan terobosan guna peningkatan pendapatan melalui retribusi pasar, Parkir Kusus area pasar dan Pelayanan Kemetrolagian di kota samarinda.

Tabel 2.8

**KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB KOTA SAMARINDA ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2011 - 2016**

NO	TAHUN	PDRB KOTA SAMARINDA (Juta Rupiah)	PDRB PERDAGANGAN (juta Rupiah)	KONTRIBUSI PDRB ERDAGANGAN (%)	LAJU PERTUMBUHAN (%)
1	2011	35.535.425,80	5.327.134,10	14,99%	1,46%
2	2012	35.711.573,40	5.568.016,20	15,59%	4,52%
3	2013	37.471.852,60	5.565.378,60	14,85%	-0,05%
4	2014	39.506.305,30	5.945.025,10	15,05%	6,82%
5	2015	39.523.547,41	6.160.558,88	15,59%	3,63%
6	2016	39.733.062,15	6.388.944,20	16,08%	3,71%



Tabel 2.9
NILAI PDRB SEKTOR PERDAGANGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2011 - 2017

NO	TAHUN	PDRB KOTA SAMARINDA (Juta Rupiah)	PDRB PERDAGANGAN (juta Rupiah)	KONTRIBUSI PDRB ERDAGANGAN (%)	LAJU PERTUMBUHAN (%)
1	2011	41.648.707,27	5.934.129,11	14,25%	13,02%
2	2012	41.242.817,59	6.038.544,79	14,64%	1,76%
3	2013	44.824.302,23	6.582.632,59	14,69%	9,01%
4	2014	48.273.715,39	7.194.638,96	14,90%	9,30%
5	2015	50.799.587,57	7.709.975,96	15,18%	7,16%
6	2016	52.334.150,71	8.158.000,53	15,59%	5,81%
7	2017	57.946.612,25	8.935.476,00	15,42%	9,53%



Tabel 2.10

**LAJU INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2011 - 2017**

Kategori/Lapangan Usaha	[Seri_2010] Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.85	4.92	5.10	-0.19	16.99	4.71	12.39
B. Pertambangan dan Penggalian	52.63	-12.98	-5.31	-13.07	4.83	6.63	6.91
C. Industri Pengolahan	4.89	3.81	3.19	7.73	5.95	2.35	4.95
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-7.11	-5.61	-0.47	-2.08	3.41	2.03	3.77
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3.30	1.79	1.45	1.90	6.08	2.46	3.90
F. Konstruksi	3.77	7.41	5.91	7.08	6.92	6.48	4.11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.39	-2.64	9.06	2.32	0.17	3.04	1.59
H. Transportasi dan Pergudangan	5.41	2.38	10.75	9.59	5.01	2.52	4.77
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.28	5.61	4.66	6.33	1.28	3.66	4.81
J. Informasi dan Komunikasi	2.49	1.49	-0.18	0.88	4.94	8.21	6.08
K. Jasa Keuangan	6.22	9.26	4.25	3.23	9.94	-0.28	2.97
L. Real Estate	7.74	3.47	2.64	4.67	6	4.74	3.61
M,N. Jasa Perusahaan	6.26	3.87	6.53	8.02	8.26	5.97	2.06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.99	11.01	3.70	7.60	12.05	8.74	6.14
P. Jasa Pendidikan	12.87	6.85	9.40	3.53	16.99	4.71	12.39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.14	3.35	3.90	9.56	4.83	6.63	6.91
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5.18	5.71	3.93	7.43	5.95	2.35	4.95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.20	-1.46	3.58	2.15	5.19	2.48	6.86



Tabel 2.11

Jumlah Pasar Modern, Tradisional, dan SPBU di Kota Samarinda

Kecamatan	Pasar Modern	Pasar		SPBU
		Tradisional	Jumlah Pedagang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Samarinda Kota	23	3	2.411	1
Samarinda Ilir	13	3	405	1
Samarinda Utara	21	3	24	5
Samarinda Ulu	59	3	2.485	5
Samarinda Seberang	16	3	719	1
Sambutan	8	4	900	2
Sungai Kunjang	33	4	1.088	5
Sungai Pinang	35	3	789	2
Palaran	1	2	254	1
Loa Janan Ilir	15	3	278	3
JUMLAH	224	31	9353	26

Pasar Modern di Kota Samarinda cukup banyak terutama dikuasai oleh 3 perusahaan yaitu Indomaret, Alfamidi dan Era Mart. Pasar Tradisional di Kota Samarinda ada 31 pasar dan diantaranya ada 2 pasar induk yang terletak di Kecamatan Samarinda Kota (Pasar Pagi) dan Kecamatan Samarinda Ulu (Pasar Segiri). SPBU di Kota Samarinda tersebar diseluruh Kecamatan Kota Samarinda terutama di Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang.



Tabel 2.12
Perkembangan Penerbitan SIUP Baru
Di Kota Samarinda Tahun 2010 - 2015

Tahun	SIUP			Jumlah
	Pedagang Kecil	Pedagang Menengah	Pedagang Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	1.113	576	513	2.202
2011	893	620	565	2.078
2012	1.109	662	281	2.052
2013	1.184	760	77	2.021
2014	1.105	521	84	1.710
2015	876	442	37	1.355
total s/d 2015	6.280	3.581	1.557	11.418

SIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu BP2TSP sesuai domisili tempat usaha. Dilihat dari tabel diatas, kenaikan jumlah penerbitan SIUP dilakukan untuk pedagang kecil. Sedangkan untuk pedagang besar jumlahnya semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 penerbitan SIUP turun sebesar 1.355, sedangkan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2014, adalah sebesar 1.710 penerbitan SIUP.



Tabel 2.13
PERKEMBANGAN PENERBITAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 - 2015

TAHUN	BENTUK PERUSAHAAN						JUMLAH
	PT	KOPERASI	CV	Fa	PO	BPL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2010	693	31	805	3	464	1	1.997
2011	673	25	822	-	368	1	1.889
2012	835	36	1.236	-	591	-	2.698
2013	949	20	1.192	-	595	-	2.756
2014	819	20	1.186	-	619	1	2.645
2015	409	11	587	-	367	-	1.374
JUMLAH S/D 2015	4.378	143	5.828	3	3004	3	13.359

TDP atau Tanda Daftar Perusahaan merupakan tanda bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten. Dilihat dari tabel di atas terjadi peningkatan pada pendaftaran TDP di Kota Samarinda dari tahun 2010-2014, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015.



Tabel 2.14
REALISASI EKSPOR KOMODITI UTAMA
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2011 - 2013
(US.\$)

NO.	KOMODITI	TAHUN		
		2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Lemak dan Minyak Nabati/Hewani	17.689.250	58.282.541	-
2.	Gula dan Kembang Gula	-	507.849	-
3.	Bahan Bakar Mineral	897.207.917	5.776.001.364	5.183.193.841
4.	Kayu dan Barang dari Kayu	5.330.633.236	181.579.343	174.169.125
5.	Ketel, Mesin dan Peralatan Mekanis	143.224	428.500	134.550
6.	Kendaraan dan Suku Cadang	-	8.258.116	2.262.475
7.	Kapal, Perahu dan Struktur Terapung	4.480	162.373	7.150.000
8.	Lainnya	119.955	603.235	36.015
JUMLAH		6.245.798.062	6.025.823.321	5.366.946.006

Tabel diatas adalah tabel yang menunjukkan realisasi ekspor komoditas utama di tahun 2012 dan 2013. Dilihat dari keseluruhan tabel, realisasi ekspor komoditas mengalami penurunan. Sektor Bahan Bakar Mineral yang menjadi komoditas ekspor nilainya berkurang dari 6.025.823.321 di tahun 2012, menjadi 5.336.946.006 di tahun 2013.



Tabel 2.15
JUMLAH KOMODITI UTAMA EKSPOR
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2010 - 2014

NO.	TAHUN	JUMLAH KOMODITI EKSPOR
1.	2010	9
2.	2011	9
3.	2012	8
4.	2013	6
5.	2014	3

Tabel 2.16
Perkembangan Nilai Ekspor, Impor Migas Dan Non Migas
Kota Samarinda Tahun 2010 - 2014 (US.\$)

No.	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ekspor				
	1. Migas	-	-	-	-
	2. Non Migas	4.460.232.345	6.245.798.062	6.025.823.321	5.366.946.006
Total		4.460.232.345	6.245.798.062	6.025.823.321	5.366.946.006
2.	Import				
	1. Migas	25.887.085	64.234.396	52.435.646	132.811.611
	2. Non Migas	460.311.117	447.946.215	491.277.851	306.870.123
Total		486.198.202	512.180.611	543.713.497	439.681.734
3.	Suplus/Defisit				
	1. Migas	(25.887.085)	(64.234.396)	(52.435.646)	(132.811.611)
	2. Non Migas	3.999.921.228	5.797.851.847	5.534.545.470	5.060.075.883
Total		3.974.034.143	5.733.617.451	5.482.109.824	4.927.264.272

Dilihat pada tabel 2.25, nilai ekspor non migas dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan karena turunnya harga batubara di pasar dunia. Batubara merupakan penyumbang nilai ekspor terbesar Kota Samarinda. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perkembangan nilai ekspor maupun impor migas maupun non migas selalu fluktuatif.



Tabel 2.17
Jumlah Tera Ulang Alat Ukur Menurut Jenisnya
Di Kota Samarinda Tahun 2010 - 2015

No.	Jenis Alat Ukur	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Anak Timbangan Biasa	2.244	2.572	2.378	2.999	3.509
2	Anak Timbangan Halus Obat	-	-	-	-	-
3	Anak Timbangan Halus Emas	605	-	340	11	539
4	Anak Timbangan Halus Miligram	-	282	-	-	-
5	Neraca Emas	78	32	42	27	59
6	Neraca Obat	3	-	-	-	-
7	Timbangan Meja	488	511	498	607	751
8	Timbangan Bobot Ingsut	41	12	11	11	11
9	Timbangan Dacin Logam	108	47	41	47	66
10	Timbangan Sentisimal	111	21	15	18	25
11	Timbangan Cepat	7	-	-	-	-
12	Timbangan Kwadran/Surat	-	-	-	-	-
13	Timbangan Pegas	643	576	598	811	1.028
14	Timbangan Elektronik	106	4	2	13	19
15	Timbangan Halus Elektro	140	58	21	105	66
16	Timbangan Meter Kadar Air	8	-	-	-	-
17	Takaran Basah	-	15	-	3	33
Jumlah		2.803	4.582	4.130	3.950	6.106

Pada tabel 2.26, terlihat bahwa kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang alat ukurnya semakin baik, hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pada tahun 2011, alat ukur yang ditera ulang sebanyak 2.803 buah dan pada tahun 2015 naik menjadi 6.106 buah.



Tabel 2.18
Perkembangan Laju Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Komoditi
Di Kota Samarinda Tahun 2011 - 2015

No.	Kelompok Komoditi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bahan Makanan	5,55	6,59	11,66	4,47	0.81
2.	Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,04	8,56	13,24	7,26	0.35
3.	Perumahan	7,83	2,81	10,61	7,17	0.07
4.	Sandang	12,40	5,74	-1,79	3,20	-0.03
5.	Kesehatan	2,86	3,52	7,59	4,56	0.03
6.	Pendidikan dan Olahraga	10,05	4,68	9,74	3,87	0.01
7.	Transport dan Komunikasi	1,27	1,00	12,62	11,06	0.07
Samarinda		6,23	4,81	10,37	6,74	4,24
Kaltim		6,35	5,60	9,65	7,66	4,89
Nasional		3,78	4,30	8,38	8,36	3,35

Dari tabel di atas, terlihat bahwa inflasi Kota Samarinda selalu di bawah Kaltim kecuali tahun 2013. Inflasi Kota Samarinda selalu di atas inflasi Nasional kecuali tahun 2014. Pada tahun 2013, inflasi Kota Samarinda sangat tinggi yaitu 10,37 %, hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Pada tahun 2014, inflasi Kota Samarinda lebih rendah dari Kaltim dan Nasional, hal ini disebabkan oleh lancarnya distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya serta adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi dan pihak-pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda.



Tabel 2.19

**PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA BAHAN POKOK MENURUT
JENISNYA
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2011- 2015 (Rupiah)**

NO.	JENIS BAHAN POKOK	SATUAN	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Beras Bengawan	Kg	9.500	10.000	10.750	11.250	11.850
2.	Beras Rapak Ex Lokal	Kg	7.400	8.000	8.750	9.500	10.000
3.	Gula Pasir Luar Negeri	Kg	12.500	13.500	14.850	15.200	14.800
4.	Gula Pasir Dalam Negeri	Kg	11.100	11.950	11.900	11.150	12.250
5.	Tepung Terigu	Kg	6.750	7.500	8.000	8.250	9.850
6.	M. Goreng Bimoli BS	1 Liter	13.425	14.550	14.175	14.675	15.250
7.	M. Goreng Curah	620 ML	6.000	6.500	6.250	6.500	7.500
8.	Daging Sapi Murni	Kg	71.000	112.500	102.500	120.000	128.150
9.	Daging Ayam Broiler	Kg	23.250	37.500	37.500	45.000	42.700
10.	Daging Ayam Kampung	Ekor	83.500	90.000	85.000	90.000	87.750
11.	Telur Ayam Broiler	Kg	25.850	34.500	34.500	37.500	40.200
12.	Telur Ayam Kampung	Kg	32.750	34.500	49.500	57.500	54.550
13.	Susu KM. Bendera	397 gr	8.625	9.000	9.050	11.213	11.000
14.	Susu KM. Indomilk	390 gr	8.188	8.300	8.900	10.563	11.600
15.	Susu Bubuk Bendera	400 gr	27.375	29.400	31.900	39.263	41.000
16.	Susu Bubuk Indomilk	400 gr	24.988	25.825	26.975	34.750	42.200
17.	Jagung PK Kualitas Satu	Kg	5.500	6.750	7.000	9.000	10.100
18.	Jagung PK Lokal	Kg	4.350	5.500	5.750	7.500	8.950
19.	Garam Halus	250 gr	675	875	1.000	1.250	1.350
20.	Kacang Kedelai Impor	Kg	9.500	9.500	10.750	12.000	12.000
21.	Kacang Kedelai Lokal	Kg	8.500	8.500	9.250	10.000	10.100
22.	Indomie Rasa Kare Ayam	Bungkus	1.525	1.575	1.800	1.968	2.250
23.	Cabe Merah Besar	Kg	63.500	28.500	36.000	60.000	41.650
24.	Cabe Keriting	Kg	62.500	28.500	36.000	63.500	40.908
25.	Cabe Biasa/Tiung	Kg	71.000	23.500	43.500	81.000	49.621
26.	Cabe Rawit	Kg	80.000	32.500	55.000	83.000	60.675
27.	Bawang Merah	Kg	16.000	13.000	24.000	31.500	28.033
28.	Bawang Putih	Kg	-	18.000	19.000	22.000	25.958



29.	Ikan Asin Teri Kecil	Kg	52.500	40.000	60.000	75.000	74.125
30.	Ikan Asin Teri Besar	Kg	36.000	26.000	30.000	45.000	56.775
31.	Kacang Hijau	Kg	17.000	15.500	19.500	24.000	21.833
32.	Kacang Tanah	Kg	17.000	18.500	19.500	22.000	24.583
33.	Ketela Pohon	Kg	3.000	3.500	4.000	4.000	4.500
34.	Minyak Tanah	Liter	9.250	11.500	13.500	14.000	14.500

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hampir semua komoditi rata-rata mengalami kenaikan harga pada setiap tahunnya, kecuali untuk beberapa komoditi seperti daging sapi murni, daging ayam broiler, daging ayam kampung, telur ayam broiler, telur ayam kampung, cabe merah besar, cabe keriting, cabe biasa/tiung dan cabe rawit yang mengalami fluktuasi harga.

Tabel 2.20

**JUMLAH STOK AKHIR BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2010 - 2014**

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Beras Dolog	Kg	1.326.460	3.263.190	2.735.044	3.985.167	3.742.274
2.	Beras Non Dolog	Kg	510.215	1.704.960	1.333.000	2.726.045	3.176300
3.	Gula Pasir	Kg	562.300	803.685	1.013.700	2.572.905	2.019.315
4.	Minyak Goreng	Kg	1.548.150	927.530	881.220	558.390	1.809.202
5.	Susu Bubuk	Kg	536.500	583.075	753.750	985.660	609.900
6.	Mentega	Kg	382.400	438.720	611.100	628.605	920.260
7.	Tepung Terigu	Kg	551.350	845.800	636.200	721.740	1.673.190
8.	Jagung Pipilan	Kg	377.650	569.060	445.825	755.915	843.590
9.	Kacang Kedelai	Kg	722.300	505.835	751.055	788.630	583.145
10.	Garam Beryodium	Kg	794.600	454.895	949.200	1.556.400	1.007.360
11.	Telur	Kg	603.250	335.870	776.300	332.140	695.406
12.	Daging Sapi	Kg	827.350	192.157	667.250	985.840	479.710
13.	Daging Ayam	Kg	364.150	639.935	554.450	544.885	537.385
14.	Minyak Tanah	Liter	726.500	280.600	648.650	153.150	684.750



15.	Semen Tonasa 50 Kg	Ton	-	4.000	53.653	102.998	56.701
16.	Semen Gresik 50 Kg	Ton	24,00	3.200	6.499	32.873	2.998
17.	Semen Bosowa 50 Kg	Ton	-	48,40	19.875	46.509	28.548
18.	Semen Tiga Roda 50 Kg	Ton	33,00	2.315	250.199	37.649	7.524
19.	Pupuk Urea	Ton	143,25	1.951.000	422.850	705.950	533.350
20.	Pupuk TSPO 36/TSP	Ton	10,30	-	-	-	144.970
21.	Pupuk ZA/NPK	Ton	22,10	203.350	148.150	118.100	2.019.315
22.	Pupuk KCL	Ton	10,00	-	-	-	-

Dari tabel di atas, terlihat bahwa stok sembako pada akhir tahun cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Samarinda karena distribusi sembako yang lancar. Stok semen dari tahun ke tahun semakin baik, hal dapat dilihat pada stok tahun 2013 dan 2014 yang besar sehingga pada 2 tahun tersebut tidak mengalami kenaikan harga semen seperti tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2012, PT. Pupuk Kaltim sebagai distributor pupuk bersubsidi di wilayah Samarinda dan sekitarnya hanya menyalurkan 2 jenis pupuk yaitu Urea dan ZA/NPK.

Tabel 2.21

Pasar Yang dikelola Pemerintah Kota Samarinda

NO	NAMA PASAR	TYPE	KONDISI FISIK SAAT INI
1	Pasar Pagi	A1	Baik
2	Pasar Segiri	A1	Baik
3	Pasar Sei Dama	A1	Baik
4	Pasar Merdeka	A2	Baik
5	Pasar Kedondong	A2	Baik
6	Pasar Ijabah	A2	Baik
7	Pasar Palaran	A2	Baik
8	Pasar Bengkuring	A2	Baik
9	Pasar Lok Bahu	A2	Kurang Baik
10	Pasar Baqa	A2	Tahap Pembangunan
11	Pasar Kemuning	A2	Kurang Baik
12	Citra Niaga	A2	Baik
13	Pasar Makroman	B	Tidak Aktif
14	Pasar Sambutan (Pelita7)	B	Tidak Aktif



Tabel 2.22

Pasar yang dikelola Swasta

NO	NAMA PASAR	TYPE	KONDISI FISIK SAAT INI
1	Pasar Rahmat	C	Baik
2	Pasar Loa Janan	C	Kurang baik
3	Pasar Harapan Baru	C	Sangat kurang
4	Pasar Sungai Dama Lama	C	Sangat kurang
5	Pasar Subuh	C	Kurang baik
6	Pasar Mangkupalas	C	Kurang baik
7	Pasar Kehewanan	C	Sangat kurang
8	Pasar Arum	C	Baik
9	Pasar Pulau Atas	C	Baik
10	Pasar Loa Buah	C	Sangat kurang
11	Pasar Bukuan	C	Kurang baik
12	Pasar Suryanata	C	Proses pembangunan
13	Pasar Sei Keledang	C	Sangat kurang
14	Pasar GP	C	Sangat kurang
15	Pasar Desa Pampang	C	Kurang baik

Dari tabel 2.21 diatas dapat dijelaskan bahwa masih terdapat 2 pasar yang tidak aktif yaitu pasar makroman dan pasar sambutan (pelita), tugas Dinas Perdagangan Kota samarinda untuk bisa kembali mengaktifkan kedua pasar tersebut dalam pemenuhan peayanan kepada masyarakat sekitar serta penambahan pendapatan retribusi dari pasar tersebut. sedangkan pada tabel 2.22 terdapat banyak sekali pasar yang kurang baik dimana pasar tersebut dikelola oleh pihak swasta jadi sulit untuk dapat embenahi pasar tersebut.



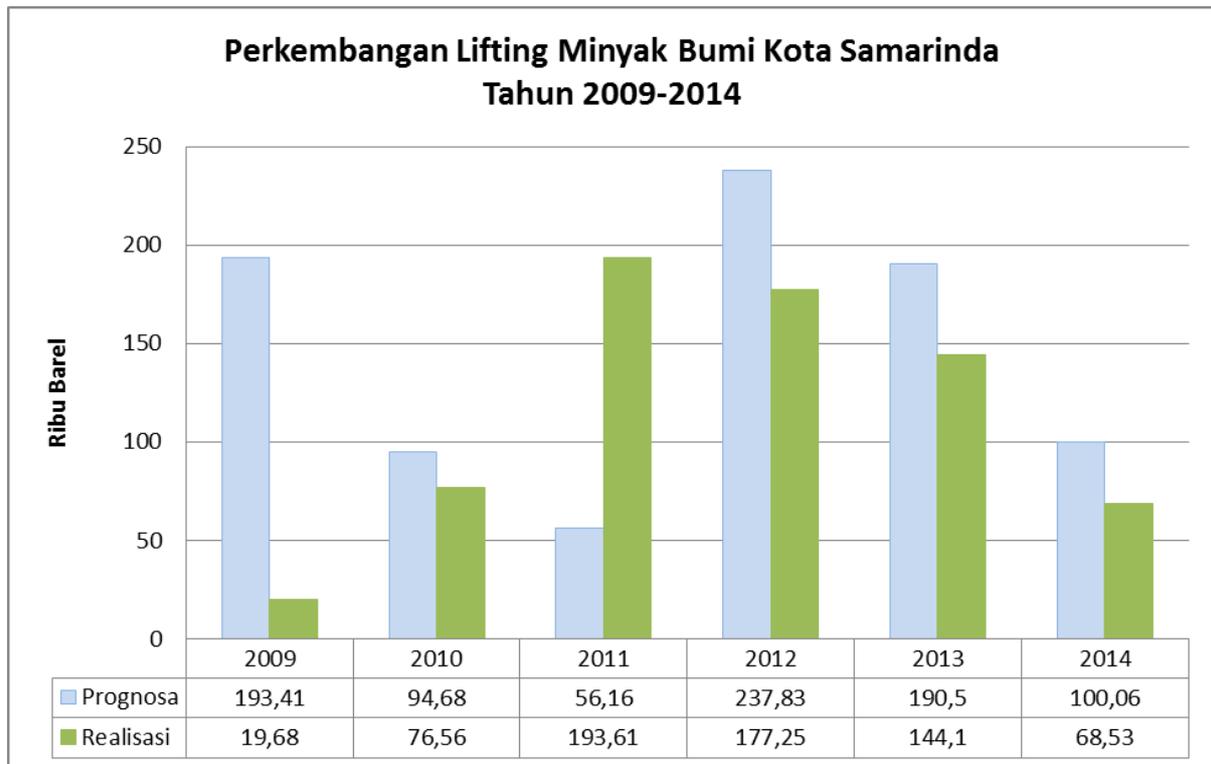
Tabel 2.23

PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK BUMI KOTA SAMARINDA TAHUN 2009- 2014

Minyak Bumi

No	Tahun	Prognosa	Realisasi	Pencapaian Sasaran
		(Ribu Barel)	(Ribu Barel)	(%)
1	2009	193,41	19,68	10,18
2	2010	94,68	76,56	80,86
3	2011	56,16	193,61	344,75
4	2012	237,83	177,25	74,53
5	2013	190,5	144,1	75,64
6	2014	100,06	68,53	68,49

Gambar 2.2





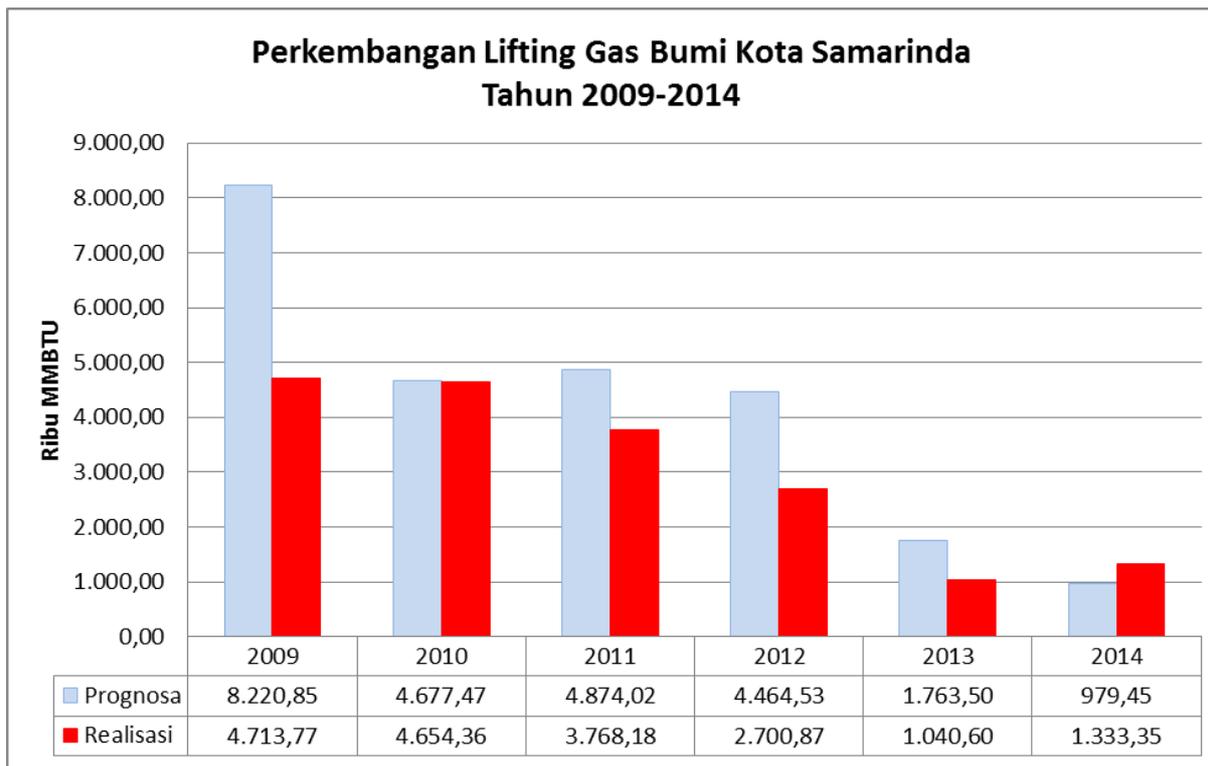
Tabel 2.24

PERKEMBANGAN LIFTING GAS BUMI KOTA SAMARINDA TAHUN 2009- 2014

Gas Bumi

No	Tahun	Prognosa	Realisasi	Pencapaian Sasaran
		(Ribu MMBTU)	(Ribu MMBTU)	(%)
1	2009	8.220,85	4.713,77	57,34
2	2010	4.677,47	4.654,36	99,51
3	2011	4.874,02	3.768,18	77,31
4	2012	4.464,53	2.700,87	60,50
5	2013	1.763,50	1.040,60	59,01
6	2014	979,45	1.333,35	136,13

Gambar 2.3





Tabel 2.25

**DATA PKL DAN POTENSINYA DIWILAYAH PASAR
DI KOTA SAMARINDA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015**

NO	NAMA PASAR	JUMLAH AKTIF						JUMLAH TIDAK AKTIF						POTENSI TIDAK AKTIF	POTENSI SELURUH	
		RUKO	TOKO	PETAK	LOS	KIOS	PKL	AKTIF	RUKO	TOKO	PETAK	LOS	KIOS			PKL
1	CITRA NIAGA	-	-	102	157	-	0	259	-	-	60	56	-	-	116	375
2	PAGI	-	10	838	268	312	241	1669	-	-	173	85	41	-	299	1968
3	Sei DAMA	-	-	55	75	-	40	170	-	-	45	285	10	-	340	510
4	BAQA	-	-	67	187	-	36	290	-	-	116	-	-	-	116	406
5	PALARAN	-	-	67	105	-	40	212	-	-	5	33	-	-	38	250
6	KEMUNING	-	-	25	90	-	-	115	-	-	-	22	-	-	22	137
7	SEGIRI	3	54	646	444	65	183	1395	2	21	431	91	66	-	611	2006
8	UABAH	-	-	31	190	-	5	226	-	-	-	19	-	-	19	245
9	KEDONDONG	-	-	103	60	-	90	253	-	-	169	54	-	-	223	476
10	KARANG PACI	-	-	38	-	-	-	38	-	-	246	-	-	-	246	284
11	BENGGURUNG	-	-	21	-	-	6	27	-	-	-	170	-	-	170	197
12	MERDEKA	32	-	98	85	-	285	500	6	-	78	13	-	-	97	597
TOTAL		35	64	2091	1661	377	926	5154	8	21	1323	828	117	0	2297	7451



Tabel 2.26
 DATA IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI SAMARINDA
 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
 BERDASARKAN JENIS PEMBANGKIT

NO	JENIS PEMBANGKIT	TOTAL DAYA (KVA)				
		0 - 2.500	2.501 - 5.000	5.001 - 10.000	10.001 - 15.000	Diatas 15.000
1	TENAGA DIESEL	68	3	1	1	-
2	TENAGA UAP	-	-	1	-	1
3	TENAGA SURYA	3	-	-	-	-
	JUMLAH	71	3	2	1	1

Tabel 2.27
 DATA IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI SAMARINDA
 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
 BERDASARKAN PENGGUNAAN

NO	PENGGUNAAN	TOTAL DAYA (KVA)				
		0 - 2.500	2.501 - 5.000	5.001 - 10.000	10.001 - 15.000	Diatas 15.000
1	UTAMA	24	-	1	1	1
2	DARURAT	42	3	1	-	-
3	CADANGAN	5	-	-	-	-
	JUMLAH	71	3	2	1	1



Tabel 2.28
DATA CAPAIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2010 - 2015

NO	sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal perencanaan	Target capaian pada akhir perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-									
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan perindustrian dan perdagangan yang berfungsi baik setiap tahun	Jumlah data dan Informasi Industri dan Perdagangan Jumlah pengguna alat UTPP yang sesuai aturan	Buku Unit	0 2800	2 2800	2	2	2	2	2	2	2800	4582	4130	3950	4682	4654	100,11	163,64	147,5	141,07	166,14	166,21												
2	Lancarnya lalu lintas/ distribusi barang industri dari dalam menuju luar wilayah kota atau sebaliknya	Monitoring harga dan stok sembako/barang strategis Jumlah Promosi dan Informasi Produk Meitf Klas Samarinda	Data kai	96 0	96 4	96	96	96	96	96	96	104	104	104	104	104	104	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33												
3	Traksianannya pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Jumlah Pelaku usaha Industri logam dan Galangan Kapal yang diberi Pelatihan	orang	0	100	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	200	0												

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016-2021



NO	sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-					
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013
5	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama serta kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pihak swasta dan perbankan serta pihak terkait lainnya dibidang industri dan perdagangan	Jumlah kegiatan pelatihan tentang tata kelola keuangan dan tata kelola lingkungan terhadap pelaku IKM	Kali	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	100	100	0	100

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016-2021



NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-									
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
1	Penyuluhan dan Sosialisasi Periferal Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	Pelaku Usaha	12	24	12	12	12	24	24	24	24	24	12	12	12	24	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100	100						
2	Facilitasi Kemiripan konsultasi keuangan dengan bagi usaha mikro	jumlah Pelaku usaha yang di bina	Pelaku Usaha	0	100	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	20	20	20	20	0	0	100	100	100	100	100	100	0							
3	Peningkatan pembayaran perdagangan dalam negeri	Jumlah data harga dan stok	Jumlah data	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	100	100	100	100	100	100	100	100							
4	Meningkatkan Pelayanan Metrologi - Kota Samarinda	Jumlah Alat UTPP yang sesuai aturan	unit	0	1400	0	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	0	1582	1530	1950	1652	1500	0	113	109	139	118	107										
5	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Komoditi Ekspor	Komoditi	0	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0	9	8	6	3	3	0	300	267	200	100	100										

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016-2021



NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-								
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
6	Informasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Industri Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Pelaku usaha	0	24	12	0	12	53	53	53	53	12	0	12	53	53	53	100	0	100	100	100	100
7	Kejasama dan Koordinasi Industri Perdagangan	Prosentase data sentra kota samarinda	presentase	0	100	100	100	100	100	100	100	100	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sistem Informasi Manajemen Industri Perdagangan (SMS Broadcast)	Jumlah informasi barang strategis di Kota samarinda	Jumlah	0	19	0	0	0	19	19	19	19	0	0	0	19	19	19	0	0	0	100	100	100



Tabel 2.29

**DATA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA**

No	Uraian *)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi					Rata-rata				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Penyuluhan dan sosialisasi perlindungan konsumen	150.000.000	58.910.000	70.000.000	400.000.000	150.000.000	100.000.000	75.172.000	58.810.000	69.998.000	292.856.900	149.970.600	99.670.000	50,11%	99,83%	100,0%	73,21%	99,98%	99,67%	66,74%	46,66%
2	Misi deegang luar negeri	300.000.000	-	-	-	-	-	175.888.000	-	-	-	-	-	88,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-20,00%	-100,00%
3	Peningkatan Pelayanan Perdagangan dalam Negeri	200.000.000	-	101.000.000	158.000.000	478.300.000	165.000.000	142.120.000	-	100.925.000	87.925.000	454.311.300	142.360.000	71,06%	0,00%	99,93%	55,65%	94,98%	86,28%	23,41%	58,79%
4	Palayanan Metrologi se-Kota Samarinda	-	42.270.000	67.500.000	83.700.000	140.000.000	165.000.000	-	42.270.000	63.600.000	58.150.000	140.000.000	154.000.000	0,00%	100,0%	94,22%	69,47%	100,0%	93,33%	42,20%	48,16%
5	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	-	-	25.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	-	-	24.041.900	39.830.000	50.000.000	39.627.346	0,00%	0,00%	96,17%	79,66%	100,0%	99,07%	16,00%	23,49%
6	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan/penerbitan Igalitas usaha industri dan perdagangan	100.000.000	-	75.000.000	951.000.000	150.000.000	348.611.500	67.375.000	-	73.535.000	674.925.000	148.523.300	291.457.350	67,38%	0,00%	96,05%	70,97%	99,02%	83,61%	279,05%	184,02%
7	Kepribasan dan Koordinasi Industri dan Perdagangan	100.000.000	-	30.000.000	50.000.000	371.250.000	-	83.028.000	-	30.000.000	16.125.000	361.764.600	-	83,03%	0,00%	100,0%	32,25%	97,45%	0,00%	127,29%	474,31%
8	Sistem Informasi Manajemen Industri dan Perdagangan (SIMS Boradcast)	-	-	-	840.000.000	-	164.988.500	-	-	-	822.168.500	-	161.584.200	0,00%	0,00%	0,00%	97,88%	0,00%	97,94%	-50,00%	-50,00%



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Perdagangan Kota Samarinda dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam kinerja pelaksanaan pembangunan perdagangan di Kota Samarinda sebagai berikut

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah sebuah peluang yang berorientasi ke masa mendatang, yang harus dimanfaatkan. Berikut adalah tantangan Dinas Perdagangan Kota Samarinda:

- a) Era globalisasi menjadikan Kota Samarinda dituntut untuk lebih meningkatkan daya saing perdagangan yang positif dan kompetitif. (MEA 2015).
- b) Perdagangan bebas yang dapat melemahkan posisi pengusaha lokal
- c) Upah murah untuk tenaga kerja/pelaku usaha/produsen lokal yang bersaing dengan tenaga kerja dari negara luar yang lebih terampil, professional dan kompetitif, sehingga mempengaruhi tingkat harga produsen/ konsumen yang cenderung lebih murah.
- d) Ketergantungan pasokan komoditi dari daerah lain.
- e) Deregulasi dan debirokrasi bidang perdagangan yang menghambat pengaturan, pembinaan dan pengawasan perdagangan di kota Samarinda.
- f) Keberadaan pusat perbelanjaan modern yang mengalahkan pasar tradisional.
- g) Tidak terkendalinya jumlah pasar kaget/malam dan PKL luar wilayah pasar.
- h) Kurangnya SDM Dinas Perdagangan Kota Samarinda di bidang teknis Perdagangan
- i) Kurangnya sarana dan prasarana berupa perangkat, jaringan, aplikasi guna mendukung kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat



2.5.2 Peluang

Peluang adalah sebuah kesempatan yang akan terjadi di masa depan. Peluang berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan atau kemungkinan. Peluang yang mungkin terjadi untuk Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a) Dukungan positif Pemerintah Kota Samarinda berupa Visi dan Misi Pemerintah yang selaras dan berkesinambungan.
- b) Letak geografis Kota Samarinda mempunyai nilai kompetitif yang strategis, dalam menumbuh kembangkan sektor perdagangan, karena merupakan Ibukota Propinsi sekaligus sebagai pusat kegiatan perekonomian Kalimantan Timur pada umumnya.
- c) Kota Samarinda merupakan pusat transportasi untuk sumber alam baik hasil hutan, pertanian tambang, perkebunan dan perikanan.
- d) Daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda yang terus meningkat.
- e) Situasi keamanan dan ketertiban Kota Samarinda yang kondusif.
- f) Dukungan masyarakat/pelaku usaha terhadap peningkatan kualitas pembangunan di bidang perdagangan.



BAB 3

Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global selalu memposisikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Dalam mengemban tugas dan perannya, Dinas Perdagangan Kota Samarinda harus memerhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda disusun sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Samarinda tahun 2016-2021.

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pendekatan serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas serta fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Secara normatif Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum Adanya pemutakhiran data rincian pedagang di Kota Samarinda
Data rincian di bidang perdagangan sangatlah diperlukan sebagai acuan pengambilan kebijakan / arah pembangunan perdagangan di Kota Samarinda, Data rinci pedagang menjadi yang paling pokok wajib dimiliki dan di update pertahun dalam rangka pemetaan perdagangan di Kota Samarinda. Hal - hal yang menyebabkan kurangnya data :
 - Belum validnya data pedagang informal di Kota Samarinda
 - Belum adanya sistem jaringan informasi berbasis web dan aplikasi data base sebagai wadah data tersebut
2. Disparitas harga bahan pokok / strategis di Kota Samarinda
Disparitas harga terjadi karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Disparitas harga di Samarinda terjadi terutama pada komoditi pertanian. Hal ini dikarenakan Komoditi pertanian bukan komoditi unggulan Kota Samarinda, sehingga pasokan barang didatangkan dari luar daerah. Hal-hal yang menyebabkan disparitas harga bahan pokok di Kota Samarinda antara lain:
 - Ketersediaan Stok Bahan Pokok yang tidak stabil
 - Manajemen distribusi barang belum efektif
 - Permintaan bahan pokok yang tinggi



3. Belum adanya produk-produk unggulan yang bisa diekspor

Kota Samarinda yang merupakan kota jasa diharapkan dapat mengembangkan salah satu komoditi yakni produk handicraft agar menjadi komoditi ekspor. Selain itu komoditi ekspor yang bisa dikembangkan oleh Samarinda antara lain, produk sarung dan batik Samarinda serta batu fosil dan manik serta aksesoris. Produk-produk unggulan Kota Samarinda sejauh ini sebenarnya sudah menembus pasar dunia. Tetapi, masih ada produk unggulan lainnya yang hanya terjual di Kota Samarinda meskipun sebenarnya layak untuk diekspor. Hal-hal yang menyebabkan belum adanya produk-produk unggulan Samarinda yang siap ekspor antara lain:

- Belum semua produk unggulan Samarinda memiliki hak cipta (contoh: sarung samarinda).
- Beberapa produk unggulan Samarinda belum memenuhi standar untuk diekspor.
- Beberapa produk unggulan adalah hasil *home industry*.
- Kurangnya modal (biaya untuk ekspor).
- Belum maksimalnya penggalian produk-produk unggulan Samarinda yang bisa diekspor.
- Belum dilakukannya kampanye produk ekspor.

4. Belum maksimalnya perlindungan terhadap konsumen di Kota Samarinda

Selama ini para konsumen di kota Samarinda sering mengalami kerugian yang salah satu penyebabnya adalah masih maraknya barang-barang *expired* yang masih terjual di kota Samarinda. Padahal, dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satu pasalnya mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. UU ini tidak hanya berfungsi melindungi konsumen tetapi dapat juga



meningkatkan kompetensi pelaku usaha dengan cara memperbaiki citra produk yang dihasilkan. Selama ini banyak terjadi kasus terkait perlindungan hak konsumen. Penyelesaian kasus terkait perlindungan konsumen tidak semuanya ditangani oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya perlindungan terhadap konsumen:

- Konsumen belum mengetahui hak-hak konsumen.
 - Belum Optimalnya pelayanan dalam bidang metrologi legal di kota samarinda dan sekitarnya
 - Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, barang berbahaya dan kealalan
 - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kemetrologian
5. Masih belum optimalnya pengelolaan data bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Salah satu sub bidang dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda salah satunya adalah Iklim usaha dan ESDM. Sub bidang ini mempunyai tugas pokok melakukan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah; melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga BBM/non BBM dan tugas pokok lainnya. Ruang lingkup Dinas Perdagangan di sub bidang ESDM ini hanya pengelolaan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya daya dukung dalam mengelola data ESDM di Samarinda. Hal-hal yang menyebabkan pengelolaan data belum optimal antara lain:

- Masih banyaknya penyelewengan dalam pendistribusian dan tata niaga BBM/Non BBM
- Belum optimalnya pengadaan peralatan dan sarana guna menunjang kelancaran tugas di sektor migas



6. Perlunya peningkatan terhadap pendapatan daerah dari Dinas Perdagangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari pasar dan retribusi pelayanan kemetrolgian. PAD untuk pungutan retribusi pasar dan metrologi di Samarinda mencapai Rp 5,2 Miliar. Jumlah ini berasal dari retribusi area parkir khusus di dalam pasar sebesar Rp 240 Juta, retribusi pelayanan kios dan lapak pasar serta layanan lainnya Rp 4,6 miliar, serta layanan kemetrolgian Rp 412 juta. Totalnya hanya sekitar Rp 5,2 miliar saja per tahun. Untuk Kota Samarinda yang memiliki 29 pasar, yang terbagi dalam 14 pasar yang dikelola oleh Pemkot Samarinda dan 15 pasar yang dikelola oleh swasta. Jumlah PAD yang dipungut oleh Dinas Perdagangan hanya pada pasar yang dikelola oleh Pemkot Samarinda. Perlunya peningkatan terhadap pendapatan retribusi pasar dikarenakan oleh:

- Perlunya peningkatan pendapatan dari retribusi pasar.
- Peningkatan pendapatan melalui retribusi pelayanan metrologi legal.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan sampah di lingkungan pasar menuju pasar sehat
- Belum optimalnya pelayanan dalam bidang metrologi legal di kota samarinda dan sekitarnya
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana di bidang metrologi legal .
- Perlu peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai



7. Penegakan terhadap pedagang yang melanggar masih rendah

Perda Kota Samarinda No.19 tahun 2001 yang mengatur tentang pengaturan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda. Isi Perda tersebut mengatur dan membina pedagang kaki lima agar berjualan di tempat yang telah disediakan yang tidak mengganggu kenyamanan & ketertiban umum, tetapi kondisi lapangan masih banyak terdapat hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah di sebutkan dalam perda itu. Salah satu faktor yang menimbulkan masalah terbesar adalah keberadaan pedagang yang bukan merupakan bagian dari pasar tersebut atau hanya sekedar membuka lapak dan berjualan. Hal ini cukup mengganggu mengingat lokasinya yang menutupi badan trotoar dan pintu masuk menuju pasar. Selain mengganggu, pedagang yang posisinya jauh dari pintu masuk merasa dirugikan dengan berkurangnya jumlah pembeli yang terserap oleh pedagang liar tersebut. Arus lalu lintas juga turut terpengaruh aktivitas tersebut sehingga menimbulkan kemacetan di jam – jam tertentu seperti saat jam kerja. Hal-hal yang menyebabkan penegakan pelanggaran pedagang yang masih rendah antara lain:

- Kurangnya tenaga dan sarana prasarana pendukung Kamtib
- Sebagian besar kondisi pasar kurang tertib hal ini dikarenakan belum optimalnya penataan pasar baik yang didalam maupun diluar pasar
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini satpol PP dan kepolisian masih lemah
- Kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan masih rendah
- Belum optimalnya penataan Pedagang baik didalam maupun di luar pasar termasuk PKL



8. Belum maksimalnya pelayanan publik

Dinas Perdagangan Kota Samarinda melaksanakan fungsi pelayanan antara lain pelayanan pengaduan sengketa konsumen skala kota; pelayanan informasi dan pengawasan terkait SNI (Standart Nasional Indonesia); pelayanan pasar rakyat dan pembinaan teknis penagihan; pelayanan umum informasi perdagangan impor dan dokumen impor; pelayanan saran pertimbangan teknis Angka Pengenal Impor (API), Pengakuan importir terdaftar, dan bidang impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi pelayanan di Dinas Perdagangan Kota Samarinda dirasanbelum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh:

- Sarana dan prasarana pelayanan yang belum optimal
- Pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal

9. Belum maksimalnya kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Strategi pembangunan menuntut format birokrasi yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Dinas Perdagangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pilihan bidang perdagangan yang didalamnya termasuk pasar dan ESDM. Luasnya ruang lingkup dari Dinas Perdagangan membutuhkan aparatur yang bukan hanya dari segi kuanitas namun juga kualitas. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kota Samarinda disebabkan oleh:

- Masih rendahnya jumlah aparatur dinas perdagangan terutama petugas lapangan
- Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih

Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah

**"TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA
METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN"**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dirumuskan 6 misi sebagai berikut

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional, dan inovatif
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan kota samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan
5. Mewujudkan masyarakat kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat kota samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius.

Dari keenam misi tersebut, misi keempat yaitu memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan merupakan misi yang melibatkan Dinas Perdagangan untuk menyukseskan misi tersebut. Perdagangan dan jasa merupakan sektor yang menjadi andalan perekonomian di Samarinda. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Samarinda adalah Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Sasaran yang ingin dicapai dari misi memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor



unggulan adalah Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks dan turut memengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dan dalam negeri di Indonesia.

A. Renstra Kementrian Perdagangan Tahun 2015-2019

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang- Undangl 7 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 3 atau dalam periode 2015-2019 memiliki arah kebijakan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah:



1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun,;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen

Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negen yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekspor nonmigas;
- Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan
- Pertumbuhan ekspor jasa



2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah sebagai berikut:

- Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
- Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional.

3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor adalah:

- Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama;
- Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) prospektif;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif;

Indikator yang digunakan untuk mengukur menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif) adalah:

- Penurunan index Non- Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)
- Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra (perbedaan dari baseline 2013); dan
- Pertumbuhannilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi (%)



4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding

Indikator peringkat dan skor pencitraan produk ekspor Indonesia pada 'Simon Anholt Nation Brand Index (NBI)

Dalam mendukung peningkatan kinerja promosi diperlukan kelembagaan ekspor yang berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja optimalnya kelembagaan ekspor adalah:

- Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor (*Market Intelligent* dan *Market Brief*) oleh dunia usaha;
- Pendirian Lembaga/Kantor Perwakilan / Pusat Promosi di dalam dan luar negeri (unit); dan
- Persentase PMKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru.

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa

Peningkatan ekspor ataupun penguatan pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya efektivitas pengelolaan ekspor adalah Penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor.

6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan adalah pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional adalah:

- Jumlah Pasar Rakyat Tipe A;
- Jumlah Pasar Rakyat Tipe B;
- Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR);



- Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi.

7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya Konsumsi produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional adalah peningkatan kontribusi produk dalam negeri. Dalam konsumsi rumah tangga nasional. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi penggunaan produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional.

8. Optimalisasi/ Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, SRG, dan Pasar Lelang:

- Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
- Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan;
- Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang.

9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan.

- b. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga barang kebutuhan pokok adalah koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu pokok adalah Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah.

c. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar di Wilayah Perbatasan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengelolaan perdagangan perbatasan adalah persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat.

10. Peningkatan Perlindungan Konsumen

Indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa adalah:

- Indeks Keberdayaan Konsumen
- Persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan;
- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (U'ITP) yang bertanda tera sah yang berlaku.

11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya kepastian dan kemudahan berusaha bidang perdagangan dalam negeri adalah:



- Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan;
- Prosentase Kab/ Kota yang dapat menerbitkan SIUP TOP maksimal 3 Hari

12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi adalah:

- Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
- Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
- Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih; dan
- Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal

13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan

14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian

3.4. Telaahan RT RW Kota Samarinda

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2014-2034, tujuan Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Dinas Perdagangan Kota Samarinda, turut andil untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan mengacu rancangan RTRW Kota Samarinda 2014-2034, rencana pola ruang kawasan budi daya untuk wilayah Kota Samarinda, khususnya diperuntukan oleh sektor perdagangan/ jasa dan industri yang terdiri atas:



1. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda, sebagai berikut:
 - a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu.
 - b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa.
 - c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.

Dinas Perdagangan Kota Samarinda berkomitment untuk mensukseskan arah pembangunan di Kota Samarinda. Strategi yang digunakan menurut RTRW Kota Samarinda tahun 2014-2034 untuk meningkatkan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan perdagangan/jasa, meliputi:

1. Mengembangkan pelabuhan utama dan terminal untuk kepentingan umum yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan;
2. Mewujudkan kawasan tepi sungai yang bersinergi dengan kawasan sekitarnya;
3. Mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;



3.5. Isu – Isu Strategis

Pada pertengahan tahun 2015, Yunani mengalami krisis ekonomi yang dalam jangka pendek memberi dampak terhadap pasar keuangan global. Nilai tukar euro terhadap dolar AS yang menurun menyebabkan dolar AS kian kuat di dunia. Di Indonesia sendiri, penguatan dolar AS mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat pada Selasa (08/09) mencapai Rp 14.304 rupiah per US\$. Situasi itu merugikan sektor riil Indonesia, terutama industri. Sebab, bahan baku bahkan barang modal industri domestik banyak tergantung dari hasil impor. Dengan terdepresiasinya rupiah terhadap dolar AS, mengimpor bahan baku akan semakin mahal.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 akan segera terlaksana beberapa bulan ke depan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah dan pelaksanaan MEA, membuat Pemerintah Indonesia harus bekerja keras melaksanakan strategi-strategi khusus. Situasi ini juga harus diperhatikan oleh Dinas perdagangan, sebagai permasalahan lingkungan eksternal yang mungkin saja berimbas ke lingkungan internal. Sebagai upaya perwujudan kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut:

a. Isu Internasional

Isu internasional merupakan isu yang berasal dari luar Indonesia yang berimplikasi terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan di bidang perdagangan 5 (lima) tahun mendatang antara lain:



1. Perdagangan Bebas

Tren ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan intra-industri *trade* antarnegara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa di berbagai negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan

b. Isu Nasional

Isu Nasional di sini merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, yang berpengaruh terhadap sektor perdagangan di Samarinda. Isu-Isu Nasional ini antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi

Kelompok masyarakat kurang mampu, rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Selain itu, perlu untuk memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar. Perlunya membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar.

c. Isu Lainnya

Isu lainnya dimaksud adalah isu-isu yang telah dianalisis, yaitu:

1. Diversifikasi produk ekspor

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, perdagangan internasional khususnya ekspor merupakan



faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan ekspor mampu membuat perekonomian dalam negeri semakin bergairah. Hal ini dikarenakan akan mampu menarik banyak investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan sumber daya alam lokal termasuk di Provinsi Kalimantan timur dimana Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahannya. Keterbukaan pasar bisa menjadi ancaman besar bagi ekonomi Indonesia bila pemerintah dan rakyat Indonesia tidak mempersiapkannya dengan baik. Disamping menjadi ancaman, keterbukaan pasar juga bisa memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja perdagangan dengan meningkatkan ekspor ke negara-negara potensial terutama kawasan Asia Afrika.

Salah satu pilihan kebijakan dan upaya yang banyak diunggulkan adalah melakukan diversifikasi ekspor. Langkah diversifikasi negara mitra dagang serta produk ekspor dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor nasional yang terganggu akibat krisis. Diversifikasi ekspor diyakini memiliki manfaat seperti menstabilkan ekspor, peningkatan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan diyakini pula menambah daya saing perekonomian suatu negara. Belum lagi disebutkan bahwa diversifikasi ekspor juga bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengembangan teknologi dan penguatan keterkaitan ke belakang dan ke depan antarsektor ekonomi (*forward and backward linkages*).

2. Perlunya data yang valid dan reliabel di bidang perdagangan sebagai acuan kebijakan

Dinas Perdagangan yang mempunyai tugas fungsi pengelolaan pemerintah di Bidang Perdagangan sangat memerlukan data yang valid dan reliabel sebagai dasar/acuan dalam pengambilan



kebijakan/keputusan yang dapat mendorong program kegiatan lebih tepat sasaran dan efisien, kondisi sekarang data di Bidang perdagangan sangatlah minim dan belum valid maka diperlukan wadah dan pengelolaan pengumpulan data yang benar dan berkelanjutan agar dipenuhi data yang valid dan reliabel di Bidang Perdagangan.

3. Ruang lingkup pengelolaan migas dan energi oleh Pemerintah daerah hanya sebatas pendataan

Pengelolaan sumber daya migas dan energi Kota Samarinda menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat. Dinas Perdagangan menjadi salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ruang lingkup pengelolaan migas dan sumber energi walaupun hanya sebatas pendataan melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha, dengan sub bidang Seksi Iklim Usaha dan ESDM. Walaupun ruang lingkup pengelolaan migas dan energi hanya sebatas pendataan, namun peran ini cukup *central*. Pendataan terkait dengan ketersediaan migas yang harus terjaga, agar sektor ini memberi pemasukan yang maksimal bagi penerimaan negara. Sehingga kedepannya, dinas Perdagangan dengan ruang lingkungnya penyediaan data migas dan energi baru terbarukan perlu mengatasi masalah Belum optimalnya dukungan data tentang migas, ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

4. Belum optimalnya pendapatan asli daerah dari bidang perdagangan
- Sumber pendapatan dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah retribusi pasar baik pasar yang dikelola pemerintah serta retribusi dari pelayanan kemetrolgian. Penarikan retribusi pasar dan kemetrolgian sudah memenuhi target yang ditentukan setiap



tahunnya tetapi tetap perlu adanya peningkatan / pengoptimalan pendapatan asli daerah di Bidang Perdagangan. Sehingga perlu adanya upaya dan kajian untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama retribusi pasar dan kemetropolitan.

5. Permasalahan klasik ketertiban pasar

Sebagian besar kondisi pasar tradisional di Kota Samarinda, Kalimantan Timur tidak bisa dikatakan nyaman dan bahkan jauh dari kriteria aman, bersih, nyaman, dan rapi. Terdapat 12 pasar tradisional di Kota Samarinda yang belum dikelola secara baik terutama pasar yang dikelola oleh swasta. Yang menjadi permasalahan umum disini sebagian besar pasar tradisional di Samarinda belum memiliki manajemen pasar yang baik. Permasalahan ini berawal dari kurangnya komunikasi dengan para pedagang, sehingga kurangnya kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar dikarenakan keterbatasan tenaga dan sarana prasarana Kamtib. Dinas Perdagangan sebagai wadah yang menaungi semua pihak perlu mengkedepankan komunikasi sehingga menimbulkan kepercayaan yang kuat baik pembeli maupun pedagang serta elemen lain yang menjadi bagian dari pasar.

6. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan

Kota Samarinda dengan *tagline* nya kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari sektor perdagangan yang belum optimal dari segi penyediaan sarana dan prasarana perdagangan. Jumlah pasar modern di Samarinda sebanyak 224, sedangkan pasar tradisional sebanyak 31 pasar. Belum meratanya sarana prasarana perdagangan



juga menjadi permasalahan kedepan yang perlu dicarikan solusinya. Contohnya di kecamatan Palaran hanya terdapat 1 pasar modern dan 2 pasar tradisional dengan jumlah pedagang sebanyak 254. Sarana dan prasarana perdagangan tidak hanya mencakup pasar modern dan pasar tradisional, sarana dan prasarana perdagangan dan jasa kota Samarinda menurut Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda no 02 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kawasan perdagangan dan jasa terutama pada pusat dan sub-sub pusat pelayanan kota;
- b. Program pembangunan dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko moderen yang ada di Kota Samarinda;
- c. Penataan kawasan pertokoan yang bersifat linear di sepanjang ruas jalan; dan
- d. Program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah kota yang tersebar di setiap kecamatan

7. Optimisasi Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Dinas Perdagangan memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang perdagangan. Fungsi fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan



Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat di semua bidang di Dinas Perdagangan untuk menunjang pelayanan publik.

Dari uraian isu-isu strategis, dari isu strategis internasional, nasional, regional, dan isu strategis lainnya maka dirumuskan isu strategis yang perlu dilakukan pembobotan untuk mengetahui isu strategis mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan menjadi strategi maupun program prioritas. Pembobotan isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka yang ditentukan, dengan mengisi tabel sebagai berikut:



Tabel 3.1

Nilai Skala Kriteria Berdasarkan Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria -							SKOR
		Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Perdagangan Bebas	20	10	20	10		25	85	
2	Pertunya data yang valid dan reliabel di bidang perdagangan sebagai acuan kebijakan	20	10	20		15		65	
3	Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi			20	10		25	55	
4	Diversifikasi produk ekspor	20	10		10			40	
5	Penyelenggaraan Pasar Sehat sesuai amanat Kemenkes Nomor 519 Tahun 2008	20	10	20	10		25	85	



Keterangan:

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100



BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Terpilih Periode 2016 - 2021 . Pelaksanaan pembangunan subsektor perdagangan Kota Samarinda mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Adapun Tujuan Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut:

MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN

Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan merupakan tujuan utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda yaitu meningkatkan penguasaan kebutuhan pasar domestik dan internasional. Dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor perdagangan, ada beberapa hal yang penting untuk dijadikan acuan guna menghadapi tantangan sekaligus menjadi tugas di masa mendatang. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan aktivitas perdagangan luar negeri demi



kemajuan bangsa, mengingat tidak ada satupun negara di dunia ini dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melakukan impor. Namun, hal ini dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan perdagangan dalam negeri. Selain itu adalah bagaimana peran Kota Samarinda dalam memperkuat perdagangan dalam negeri melalui penerapan sistem peningkatan nilai tambah ekonomi, terkait dengan kecepatan dan efisiensi biaya transportasi akibat perpindahan waktu dan tempat atas produk barang dan jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan tujuan tersebut maka Target dari indikator yang akan dicapai sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan

Indikator : Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi . Berdasarkan tujuan diatas maka Sasaran yang akan dicapai ialah sebagai beriku :

1. Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri

Indikator : Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan

Indikator : Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan

2. Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan

Indikator : Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan





Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERAGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan perdagangan	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	%	16,08	-	-	-	-	17,17%
1		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	%	4,20%	33,34%	5,12%	8,19%	0,79%	4,20%
2		Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	%	(14,04)	36,96	(14,40)	2,54	2,60	2,67





BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks, dimana tujuan-tujuan Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Dan pada akhirnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Strategi dan Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui pengoptimalan data perdagangan

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Revitalisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan



- Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar,serta pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, BDKT, Tera Ulang UTTP, Barang Berbahaya dalam rangka meningkatkan pengamanan perdagangan
- Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

Tabel 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
Misi : MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri	Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Revitalisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan
	Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan		Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar,serta pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, BDKT, Tera Ulang UTTP, Barang Berbahaya dalam rangka meningkatkan pengamanan perdagangan
			Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Perdagangan Luar Negeri





BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2016-2021, Program yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut dibagi menjadi dua yaitu program teknis dan program non teknis. Untuk program teknis adalah sebagai berikut:

1. **Program Perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan**
 - 1) Kegiatan Monitoring dan alat ukur ulang alat UTTP pompa dan SPBU
 - 2) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP)
 - 3) Kegiatan Operasional dan pembinaan pedagang menuju pasar tertib ukur
 - 4) Kegiatan Pembentukan Daerah Tertib Ukur
 - 5) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian
 - 6) Kegiatan Monitoring dan ukur ulang BDKT
 - 7) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP)



- 8) Kegiatan Operasional dan pembinaan pedagang menuju pasar tertib ukur
- 9) Kegiatan Pembentukan Daerah Tertib Ukur
- 10) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian
- 11) Kegiatan Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal
- 12) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal
- 13) Kegiatan Operasional dan Peningkatan kinerja kemetrolgian
- 14) Kegiatan Monitoring dan ukur ulang barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)
- 15) Kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi Perlindungan Konsumen
- 16) Kegiatan Perlindungan Konsumen
- 17) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

2. Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri

- 18) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kerja UPTD Pasar Pagi
- 19) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kerja UPTD Citra Niaga
- 20) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kerja UPTD Pasar Segiri
- 21) Kegiatan Operasional dan Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Pagi
- 22) Kegiatan Operasional dan Peningkatan Kinerja UPTD Citra Niaga
- 23) Kegiatan Operasional dan Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Segiri
- 24) Kegiatan Pembangunan IPAL pasar kota samarinda
- 25) Kegiatan Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan



- 26) Kegiatan Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat
- 27) Kegiatan Revitalisasi sarana dan prasarana pasar
- 28) Kegiatan Perencanaan IPAL seluruh pasar kota samarinda
- 29) Kegiatan Pemeliharaan pasar kota samarinda
- 30) Kegiatan Evaluasi, monitoring perkembangan pasar dalam wilayah kota samarinda
- 31) Kegiatan Evaluasi, monitoring perkembangan kegiatan perdagangan dalam wilayah kota samarinda
- 32) Kegiatan Revitalisasi pasar makroman Kota Samarinda (Bankeu Prov APBD 2016)
- 33) Kegiatan Rehab Berat Pasar bengkuring (Realisasi DAK Tambahan 2015)
- 34) Kegiatan Perencanaan teknis dan pembangunan pasar (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)
- 35) Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK 2016)
- 36) Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK 2016) Pembayaran Kepada Pihak Ketiga 2016)
- 37) Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Pasar rakyat (Dak Fisik Penugasan 2017)
- 38) Kegiatan Kebersihan Pasar Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)
- 39) Kegiatan Pembayaran pemeliharaan pasar kota samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)
- 40) Kegiatan Pembangunan Pasar Baqa (Pembayaran Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2015)
- 41) Kegiatan Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha
- 42) Kegiatan sarana prasarana pedagang informal



- 43) Kegiatan Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang perdagangan
- 44) Kegiatan pendataan pedagang formal dan informal di kota samarinda
- 45) Kegiatan pemetaan data di bidang perdagangan
- 46) Kegiatan profil pedagang pasar kota samarinda
- 47) Kegiatan Pendataan Pasar Malam
- 48) Kegiatan Peningkatan pelayanan perdagangan
- 49) Kegiatan Pengembangan sistem informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
- 50) Kegiatan Optimalisasi objek retribusi Pasar
- 51) Kegiatan Peningkatan administrasi dan kearsipan pembukuan pendapatan pasar
- 52) Kegiatan Kebersihan pasar kota samarinda
- 53) Kegiatan Regulasi / Kajian Bidang Perdagangan
- 54) Kegiatan Peningkatan Administrasi Pembukuan Pendapatan Pasar
- 55) Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan pelaporan kegiatan kamtib

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- 56) Kegiatan Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
- 57) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- 58) Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri
- 59) Kegiatan Promosi Dagang nasional dan internasional
- 60) Kegiatan Promosi Dan Publikasi Produk Dagang Nasional dan Internasional



4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

- 61) Kegiatan Penataan Pedagang Dalam Pasar Se Kota Samarinda
- 62) Kegiatan Penataan dan Pendataan Pedagang Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar
- 63) Kegiatan Penataan Pedagang formal dan Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar
- 64) Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan pelaporan kegiatan kantib

Selain program teknis, juga ada program non teknis yaitu program yang digunakan untuk menunjang kinerja setiap bidang dalam melaksanakan program teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda. Program non teknis antara lain:

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 65) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 66) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- 67) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 68) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 69) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 70) Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 71) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran

6. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

- 72) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- 73) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / ops
- 74) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor



7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

75) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

76) Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi

9. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

77) Kegiatan Program pengembangan sistem laporan



Tabel 6.1

Rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2019- 2021

NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019			2020			2021											
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator						
1	Program Eksistensi Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Retribusi Di Bidang Perdagangan	Rupiah	5.550.000.000	UPTD Pasar Segiri, Pasar Pagi, Citra Niaga dan Metrologi	Revisi dan optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan	#####	5.594.000.000	UPTD Pasar Segiri, Pasar Pagi, Citra Niaga dan Metrologi	Revisi dan optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan	9.190.000.000	5.829.000.000	UPTD Pasar Segiri, Pasar Pagi, Citra Niaga dan Metrologi	Revisi dan optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan	#####						
				70	Kota Samarinda			70	Kota Samarinda			70	Kota Samarinda								
		Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	Pedagang																		
		Presentase Dokumen data perdagangan yang dihasikan	%	100	Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Ulu dan Sambutan			100	Kecamatan Samarinda Utara, Sungai Piang dan Samarinda Kota			100	Kecamatan Samarinda Seberang, Pakran, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang			100	Kecamatan Samarinda Seberang, Pakran, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang	100	Kecamatan Samarinda Seberang, Pakran, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang		
		Pembangunan / Revitalisasi Pasar	Pasar	8	Pasar Pagi, Segiri, Sei Dama, Citra Niaga, Palaran, Baqa, Bengkuring, Kedondong, Kemuning, Lok Bahu, Jabah, Merdeka dan Harapan Baru			10	Pasar Pagi, Segiri, Sei Dama, Citra Niaga, Palaran, Baqa, Bengkuring, Kedondong, Kemuning, Lok Bahu, Jabah, Merdeka dan Harapan Baru			12	Pasar Pagi, Segiri, Sei Dama, Citra Niaga, Palaran, Baqa, Bengkuring, Kedondong, Kemuning, Lok Bahu, Jabah, Merdeka, Harapan Baru dan Makronan								



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019				2020				2021				
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif	
1.1	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	Rehabusi Pasar / Parkir Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Pagi	Rupiah	2.565.000.000	Pasar Pagi/ Pasar Sei Dama, Pasar Kemuning, Pasar Baga dan Pasar Palaran	Pengawasan pedagang pasar dan Mengikuti Rakor berkaitan dengan sarana perdagangan	320.000.000	0	Kota Samarinda				2	Pasar Lok Bahu , Loa Janan		
1.2	Operasional & Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Pagi	Rehabusi Pasar / Parkir Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Pagi	Rupiah	2.659.000.000	Pasar Pagi, Pasar Sei Dama, Pasar Kemuning, Pasar Baga dan Pasar Palaran	Operasional UPTD, Pengawasan pedagang pasar, Mengikuti Rakor berkaitan dengan sarana perdagangan, Pengadaan sarana prasarana unit pasar dibawah koordinasi UPTD Pasar Pagi	400.000.000	2.744.000.000	Pasar Pagi/ Pasar Sei Dama, Pasar Kemuning, Pasar Baga dan Pasar Palaran	Operasional UPTD, Pengawasan pedagang pasar, Mengikuti Rakor berkaitan dengan sarana perdagangan, Pengadaan sarana prasarana unit pasar dibawah koordinasi UPTD Pasar Pagi	500.000.000					
1.3	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	Rehabusi Pasar / Parkir Pasar yang dihasilkan UPTD Citra Niaga	Rupiah	200.000.000	Citra Niaga	Pengawasan pedagang citra niaga	320.000.000									
1.4	Operasional & Peningkatan Kinerja UPTD Citra Niaga	Rehabusi Pasar / Parkir Pasar yang dihasilkan UPTD Citra Niaga	Rupiah	200.000.000	Citra Niaga	Operasional UPTD Citra Niaga, Pengawasan Pedagang dan Mengikuti Rakor Sarana Perdagangan serta fasilitas penunjang program smart city	400.000.000	2.10.000.000	Citra Niaga	Operasional UPTD Citra Niaga, Pengawasan Pedagang dan Mengikuti Rakor Sarana Perdagangan serta fasilitas penunjang program smart city	500.000.000					



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019		2020		2021							
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator				
15	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Retribusi Pasar / Pakir Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Segiri	Rupiah	2.435.000.000	Pasar Segiri, Pasar Merdeka, Pasar Jabab, Pasar Kedondong Pasar Lok Bahu dan Pasar Bangkuning	Pengawasan pedagang pasar dan Mengikuti Rakor berkaitan dengan sarana perdagangan	320.000.000								
16	Operasional & Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Segiri	Retribusi Pasar / Pakir Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Segiri	Rupiah				2.485.000.000	Pasar Segiri, Pasar Merdeka, Pasar Jabab, Pasar Kedondong Pasar Lok Bahu dan Pasar Bangkuning	Operasional UPTD, Pengawasan pedagang pasar, Mengikuti Rakor berkaitan dengan sarana perdagangan, Pengadaan sarana prasarana unit pasar dibawah koordinasi UPTD Pasar Segiri	400.000.000	2.525.000.000	Pasar Segiri, Pasar Merdeka, Pasar Jabab, Pasar Kedondong Pasar Lok Bahu dan Pasar Bangkuning	Operasional UPTD, Pengawasan pedagang pasar, Mengikuti Rakor berkaitan dengan sarana perdagangan, Pengadaan sarana prasarana unit pasar dibawah koordinasi UPTD Pasar Segiri	500.000.000	
17	Optimalisasi Pemantauan Objek Retribusi Pasar	persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	%	100	Pasar Pagi, Segiri, Sei Dama, Cira Niaga, Palaran, Baqa, Bangkuning, Kemuning, Lok Bahu, Jabab dan Merdeka	Pendataan dan Pengawasan Retribusi Pasar	175.000.000	100	Pasar Pagi, Segiri, Sei Dama, Cira Niaga, Palaran, Baqa, Bangkuning, Kemuning, Lok Bahu, Jabab, Merdeka dan Harapan Baru	Pendataan dan Pengawasan Retribusi Pasar	400.000.000	100	Pasar Pagi, Segiri, Sei Dama, Cira Niaga, Palaran, Baqa, Bangkuning, Kemuning, Lok Bahu, Jabab, Merdeka, Harapan Baru dan Makroman	Pendataan dan Pengawasan Retribusi Pasar	425.000.000



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019					2020					2021				
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif			
18	Peningkatan Administrasi Pembinaan Pendapatan Pasar	Laporan Pengelolaan administrasi keuangan pendapatan	Dokumen					2	13 Pasar	Pembinaan pembukaan pengelolaan dana retribusi pada 13 pasar	350.000.000	2	14 Pasar	Pembinaan pembukaan pengelolaan dana retribusi pada 12 pasar	350.000.000			
19	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Kamtib	Laporan Hasil Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Kamtib	Dokumen					1 Dokumen	Pasar Se Kota Samarinda	Kota Samarinda	100.000.000	1 Dokumen	Pasar Se Kota Samarinda	Kota Samarinda	100.000.000			
1.10	Pembinaan pedagang melalui lembaga perimbangan keterampilan dunia usaha	Terhinya pedagang	Pedagang	40	Kota Samarinda	Pembinaan pedagang formal dan informal	80.000.000	40	Kota Samarinda	Pembinaan pedagang formal dan informal	80.000.000	40	Kota Samarinda	Pembinaan pedagang formal dan informal	80.000.000			
1.11	Pemrogkaan sarana prasana pedagang informal	Jumlah Unit Sarana dan prasana yang diberikan kepada pedagang Informal	Pedagang	30	Keurahan Air Hitam	Pegadaan Display dan Rombong Makanan	360.000.000	30	Keurahan Pelita	Pegadaan Display dan Rombong Makanan	360.000.000	30	Keurahan Gunungkelua	Pegadaan Display dan Rombong Makanan	360.000.000			
1.12	Regulasi/ Kajian Bidang Perdagangan	Jumlah Regulasi/ Kajian Di Bidang Perdagangan	Regulasi/kajian					2	Kota Samarinda	Regulasi/ Kajian di Bidang Perdagangan	100.000.000	1	Kota Samarinda	Regulasi/ Kajian di Bidang Perdagangan	100.000.000			
1.13	Kebersihan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Alat kebersihan dan Perbsh Pasar	Jenis	4	13 Pasar Yang Dikelola Pemerintah	Pengadaan alat kebersihan dan monitoring kebersihan pasar	250.000.000	7	13 Pasar Yang Dikelola Pemerintah	Pengadaan alat kebersihan dan monitoring kebersihan pasar	600.000.000	7	14 Pasar Yang Dikelola Pemerintah	Pengadaan alat kebersihan dan monitoring kebersihan pasar	600.000.000			
1.14	Pembangunan IPAL Pasar Kota Samarinda	IPAL Pasar	IPAL Pasar					2	Pasar Pagi dan Harapan Baru	Pembangunan IPAL Pasar	600.000.000	2	Pasar Lok Bahu dan Sungai Dama	Pembangunan IPAL Pasar	600.000.000			



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019				2020				2021			
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator
1.15	Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	Pasar	1	Pasar Segiri	Pemeliharaan Part. Pasar Segiri	150.000.000	2	Pasar Lok Bahu dan Sei Dama	Pemeliharaan Part	200.000.000	2	Pasar Pagi dan Kemuning	Pemeliharaan Part	200.000.000
1.16	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Dokumen	3	Pasar Pagi, Segiri dan Merdeka	Perencanaan Realisasi Pasar Pagi, Segiri dan Merdeka	75.000.000	6	Pasar Pagi, Harapan Baru, Jabab, Lok Bahu, Palaran dan Kemuning	Perencanaan IPAL Pasar Pagi dan Harapan Baru serta Realisasi Pasar Jabab, Lok Bahu, Palaran dan Kemuning	350.000.000	4	Pasar Kedondong, Segiri, Lok Bahu dan Sungai Dama	Perencanaan Realisasi Pasar Kedondong, Segiri serta perencanaan IPAL Pasar Lok Bahu dan Sungai Dama	250.000.000
1.17	Pembangunan dan Realisasi Pasar Rakyat (DAK)	Pasar yang dibangun / direalisasikan	Pasar	2	Pasar Segiri, Kedondong	Perbaikan Los Basah	3.000.000.000	1	Kota Samarinda	Pembangunan / Realisasi Pasar Rakyat (APBN)	1.500.000.000	2	Kota Samarinda	Pembangunan / Realisasi Pasar Rakyat (APBN)	3.000.000.000
1.18	Realisasi Sarana dan Prasarana Pasar	Sarana dan Prasarana Pasar	Pasar	3	Pasar Pagi (190), Pasar Segiri (160) dan Pasar Merdeka (150)	Pasar Pagi (perbaikan pagar dan TPS) Pasar Segiri (Perbaikan Adip Los Mendekar), Pasar (Pengecatan Pasar)	500.000.000	4	Pasar Jabab (200), Pasar Lok Bahu (150), Pasar Palaran (50), Pasar Kemuning (200)	Pasar Jabab (Perbaikan Los Sayur/Kering), Pasar Lok Bahu (Perbaikan Los Kering), Pasar Palaran (Adip Sayur), Pasar Kemuning (Perbaikan Los Ikan)	600.000.000	3	Pasar Kemuning (200), Pasar Kedondong (200), Pasar Segiri (200)	Pasar Kemuning : Perbaikan Klr unit dan Tangga, Pasar Kedondong : Perbaikan Los Sayur, Pasar Segiri : Perbaikan Part / Drainase	600.000.000
1.19	Realisasi Sarana dan Prasarana Pasar (ABT)	Sarana dan Prasarana Pasar	Pasar	3	Pasar Pagi dan Pasar Segiri	Realisasi Pasar di setiap Pasar	6.500.000.000	3	Kota Samarinda	Realisasi Berat	1.500.000.000	3	Kota Samarinda	Realisasi Berat	1.500.000.000



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019			2020			2021					
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif
1.20	Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	Laporan Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	Dokumen	1	Kota Samarinda	Pengawasan dan Monitoring Perkembangan Pasar Di Kota Samarinda	100.000.000	0				0			
1.21	Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang Perdagangan	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Aplikasi	2	Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Samarinda Ulu	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi serta pendataan Bidang Perdagangan	267.595.000	1	Kota Samarinda	Pengembangan / Peeliharaan Aplikasi	200.000.000	1	Kota Samarinda	Pengembangan / Peeliharaan Aplikasi	200.000.000
1.22	Pemetaan data dibidang perdagangan	Kecamatan yang di data	Kecamatan	3	Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Sungai Kunjing	Pendataan Bidang Perdagangan	300.000.000	3	Kecamatan Loa Jaman Ilir, Samarinda Seberang dan Palaran	Pendataan Bidang Perdagangan	300.000.000	4	Kecamatan Sambutan, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu dan Samarinda Kota	Pendataan / Update Data Bidang Perdagangan	400.000.000
1.23	Profil Pedagang Pasar Kota Samarinda	Dokumen Profil pedagang	Dokumen								1	Kota Samarinda	Pembuatan Buku Profil Pedagang dikota Samarinda	300.000.000	
1.24	Pendataan Pasar Malam Kota Samarinda	Dokumen data pedagang pasar malam setokota Samarinda	Dokumen					1	Kota Samarinda	Pendataan Pedagang Pasar Malam Tahap 1	250.000.000	1	Kota Samarinda	Pendataan Pedagang Pasar Malam Tahap 2	250.000.000
1.25	Peningkatan Pelayanan dan Stok Perdagangan	Stok Harga dan Stok Barang	Stok Harga dan Stok	5	Kota Samarinda	Stok Harga Dan Stok	300.000.000	6	Kota Samarinda	Stok Harga Dan Stok	200.000.000	7	Kota Samarinda	Stok Harga Dan Stok	200.000.000



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019				2020				2021			
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator
126	Evaluasi, Monitoring Perkembangan Kegiatan Perdagangan dalam Wilayah Kota Samarinda	Laporan Evaluasi, Monitoring Perkembangan Kegiatan Perdagangan dalam Wilayah Kota Samarinda	Dokumen	12	BPS Prov Kaltim	Pengolahan Data Inflasi		12	BPS Prov Kaltim	Pengolahan Data Inflasi		12	BPS Prov Kaltim	Pengolahan Data Inflasi	
				24	Pasar Tradisional dan Distributor Di Kota Samarinda	Pengolahan Data Harga dan Stok		24	Pasar Tradisional dan Distributor Di Kota Samarinda	Pengolahan Data Harga dan Stok		24	Pasar Tradisional dan Distributor Di Kota Samarinda	Pengolahan Data Harga dan Stok	
				8	Kelurahan Sempaja Utara, Pampang, Sei Siming, Sirdang Sari, Pulau Atas, Makroman, Gunung Lingsi dan Lempahe	Mengelenggarakan Pasar Murah dalam rangka menekan lonjakan harga pada bulan Ramadhan		10	Kelurahan TLU, Karang Anyar, Karang Asam Ulu, Kasang Asam Ilir, Loa Bakung, Lok Batu, Sei Keladang, Baga, Mesjid dan Sengkotek	Mengelenggarakan Pasar Murah dalam rangka menekan lonjakan harga pada bulan Ramadhan		12	Kelurahan : Sungai Kapih, Sambutan, Pulau Aas, Pella, Sei Dana, Sidommai, Sehil, Sidomjuo, Karang Murus, Palabuhan, SPL dan Pasar Pagi	Mengelenggarakan Pasar Murah dalam rangka menekan lonjakan harga pada bulan Ramadhan	
2	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengembangan Perdagangan	Jumlah Lokasi yang difera ulang	Lokasi	40	Kota Samarinda	Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar, terlibat ukur serta pengawasan terhadap produk berbahaya	975.000.000	40	Kota Samarinda	Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar, terlibat ukur serta pengawasan terhadap produk berbahaya	4.150.000.000	40	Kota Samarinda	Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar, terlibat ukur serta pengawasan terhadap produk berbahaya	1.750.000.000
				Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	Palaku Usaha	4875		5306		5877					



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019				2020				2021			
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikatorif
2.1	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Pertengkapannya (UTTP)	Aksi UTTP yang diawasi	Aksi UTTP	3000	Pasar Segiri, Pasar Paqi, Pasar Merdeka, Pasar Baga, Pasar Lok bahu, Pasar Sei Darna, Pasar Kedondong, Pasar Ijabah, 26 SPBU, 2 SPBE	Sidang Tara Ulang, Pengawasan PU BBM, BDKT	150.000.000	3500	Pasar Segiri, Pasar Paqi, Pasar Merdeka, Pasar Baga, Pasar Lok bahu, Pasar Sei Darna, Pasar Kedondong, Pasar Ijabah, Pasar Rahmat, Pasar Barakel, Pasar Palatan, Pasar Harapan Baru, 26 SPBU, 2 SPBE	Sidang Tara Ulang, Pengawasan PU BBM, BDKT	250.000.000	4000	Pasar Segiri, Pasar Paqi, Pasar Merdeka, Pasar Baga, Pasar Lok bahu, Pasar Sei Darna, Pasar Kedondong, Pasar Ijabah, Pasar Rahmat, Pasar Barakel, Pasar Palatan, Pasar Suryanata, Pasar Makronan, Pasar Kenuning, Pasar Mangkulapas, TP Seil, Pasar GP, Pasar Bengkang, 27 SPBU, 2 SPBE	Sidang Tara Ulang, Pengawasan PU BBM, BDKT	400.000.000
2.2	Pembentukan Daerah Terlib Ukur	Jumlah Daerah Terlib Ukur	Daerah					1	Kota Samarinda	Pencanangan Kota Samarinda menjadi daerah terlib ukur	1.500.000.000				
2.3	Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian (DAK Bidang Pasar)	Jumlah unit alat UTTP yang diadakan	Unit					5	UPTD Metrologi Kota Samarinda	Pengadaan Alat di Bidang Kemetrologian dalam rangka peningkatan pelayanan (APBN)	500.000.000	5	UPTD Metrologi Kota Samarinda	Pengadaan Alat di Bidang Kemetrologian dalam rangka peningkatan pelayanan (APBN)	500.000.000
								5							
2.4		Jumlah set alat UTTP yang diadakan	Set					5				5			



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019				2020				2021			
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator
25	Operasional dan peningkatan kinerja kemetrologian	Jumlah Revisi yang dihasilan Bidang Kemetrologian		350.000.000	Kota Samarinda	Operasional UPTD dan Pelayanan Kemetrologian, Material Logistik, Pemeliharaan Instalasi / lab, Bimtek/Sosialisasi/Kursus Verifikasi peralatan standar	450.000.000	250.000.000	Kota Samarinda	Operasional UPTD dan Pelayanan Kemetrologian, Material Logistik, Pemeliharaan Instalasi / lab, Bimtek/Sosialisasi/Kursus Verifikasi peralatan standar, Kendaraan Operasional (50Jula), Pembangunan Kolam Reserpor TUM (500Jula)	1.500.000.000	350.000.000	Kota Samarinda	Operasional UPTD dan Pelayanan Kemetrologian, Material Logistik, Pemeliharaan Instalasi / lab, Bimtek/Sosialisasi/Kursus Verifikasi peralatan standar	450.000.000
26	Perfindungan Konsumen	Pelaku Usaha Diawasi	Pelaku Usaha	150	Kota Samarinda	Pengawasan Terhadap : Label Minuman Beralkohol, Penggunaan Bahan Berbahaya, Barang Beredar.	300.000.000	150	Kota Samarinda	Pengawasan Terhadap : Label Minuman Beralkohol, Penggunaan Bahan Berbahaya, Barang Beredar.	300.000.000	150	Kota Samarinda	Pengawasan Terhadap : Label Minuman Beralkohol, Penggunaan Bahan Berbahaya, Barang Beredar.	300.000.000
27	Koordinasi dan Fasilitas Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dokumen Koordinasi dan Fasilitas Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dokumen	8	Kota Samarinda	Pengawasan dan monitoring bidang ESDM di Kota Samarinda	75.000.000	8	Kota Samarinda	Pengawasan dan monitoring bidang ESDM di Kota Samarinda	100.000.000	8	Kota Samarinda	Pengawasan dan monitoring bidang ESDM di Kota Samarinda	100.000.000



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019				2020				2021			
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator
3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase kegiatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	%	100	Kota Samarinda	Peningkatan kesadaran pedagang untuk ikut menjaga kebersihan dan kerbersihan lingkungan pasar	50.000.000	100	Kota Samarinda	Peningkatan kesadaran pedagang untuk ikut menjaga kebersihan dan kerbersihan lingkungan pasar	-	100	Kota Samarinda	Peningkatan kesadaran pedagang untuk ikut menjaga kebersihan dan kerbersihan lingkungan pasar	-
3.1	Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kamtib	laporan situasi dan kondisi kamtib ditinjau dari pasar	Dokumen	1	12 Pasar Yang Dikelola Pemerintah	Monitoring Keamanan dan Kelerian Pasar	50.000.000								
4	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	Komoditi	1	Kota Samarinda	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan luar negeri serta promosi dagang luar negeri	300.000.000	1	Kota Samarinda	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan luar negeri serta promosi dagang luar negeri	1.400.000.000	1	Kota Samarinda	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan luar negeri serta promosi dagang luar negeri	1.700.000.000
				4.043,35			4.148,47	4.259,24							
4.1	Peningkatan perdagangan luar negeri	komoditi ekspor unggulan daerah	Komoditi	1	Kota Samarinda	Fasilitasi pengembangan ekspor, Bimbingan teknis Pengembangan produk unggulan daerah	150.000.000	1	Kota Samarinda	Fasilitasi pengembangan ekspor, Bimbingan teknis Pengembangan produk unggulan daerah, Kurasi dan Verifikasi Produk Ekspor dan pameran dan publikasi produk unggulan daerah	400.000.000	1	Kota Samarinda	Fasilitasi pengembangan ekspor, Bimbingan teknis Pengembangan produk unggulan daerah, Kurasi dan Verifikasi Produk Ekspor dan pameran dan publikasi produk unggulan daerah	400.000.000
				4.185,55			4.294,37	4.409,03							



NO	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	2019			2020			2021						
				Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	Target	Lokasi	Rincian Program / Kegiatan	Pagu Indikator	
4.2	Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Pelaku Usaha	Orang					10	Kota Samarinda dan Jakarta	Pengembangan market place kota samarinda, Bimbingan teknis pelaku usaha ekspor produk unggulan daerah dan Fasilitas peijinan ekspor	500.000.000	10	Kota Samarinda dan Jakarta	Pengembangan market place kota samarinda, Bimbingan teknis pelaku usaha ekspor produk unggulan daerah dan Fasilitas peijinan ekspor	500.000.000	
4.3	Promosi Dagang Nasional dan Internasional	Jumlah pameran yang diikuti	Kali	3	Kota Samarinda, Jakarta, Surabaya	Pameran dan Publikasi Produk Unggulan Dalam Negeri	150.000.000									
4.4	Promosi Dan Publikasi Produk Dagang Nasional dan Internasional	Jumlah pameran yang diikuti	Kali					5	Kota Samarinda, Jakarta, Surabaya dan Selandia Baru	Pameran dan Publikasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri	500.000.000	5	Kota Samarinda, Jakarta, Bali,Materyia dan Seandia Baru	Pameran dan Publikasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri serta Fasilitas produk ekspor daerah	800.000.000	

Samarinda, 2 Juli 2018

Menggetahui

Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda

H. Adhyan, SE, MM

NIP. 19650330 199103 1 005





BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Samarinda yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perdagangan.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
	Urusan Perdagangan								
1.	Nilai Retribusi Di Bidang Perdagangan	3.939.962.300	5.253.578.480	5.130.000.000	5.550.000.000	5.594.000.000	5.829.000.000	5.829.000.000	
2.	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	0	0	0	70	70	70	70	
3.	Jumlah Pasar menuju kriteria pasar Sehat DI Kota Samarinda	0	0	0	1	1	2	2	
4.	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	1	1	1	1	1	1	1	
5.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	3.363,45	4.606,53	3.943,19	4.043,35	4.148,47	4.259,24	4.259,24	



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perdagangan Kota Samarinda

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2017	Target					TARGET AKHIR (2021)	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021			
1	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	%	4,20%	33,34%	5,12%	8,19%	0,79%	4,20%	4,20%	4,20%	Bidang Sarana Perdagangan
2	Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	%	-0,22%	6,32%	11,28%	5,69%	6,38%	2,11%	2,11	2,11	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	%	(14,04)	36,96	(14,40)	2,54	2,60	2,67	2,67	2,67	Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha





BAB 8 **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari unsur pimpinan, kapasitas dan kualitas SDM yang handal serta peran serta aktif unsur manajemen Dinas Perdagangan dalam memperkuat dukungan kegiatan pengembangan perdagangan termasuk mengomunikasikan dan memasarkan hasil produksi.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016-2021 merupakan penjabaran dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kota Samarinda 2016 - 2021 di bidang perdagangan. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda guna mendukung pencapaian sasaran.



Rancangan akhir Renstra Dinas Perdagangan diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, Kepala Dinas Perdagangan menetapkan Renstra Dinas Perdagangan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perdagangan dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
2. Pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dilakukan melalui Renja Dinas Perdagangan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Perdagangan setiap tahun.
3. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perdagangan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perdagangan per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKJIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perdagangan.

Dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja, jika Dinas Perdagangan memerlukan perbaikan atau revisi Renstra, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Perdagangan periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Perdagangan jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kota Samarinda dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.



8.2. KaidahTransisi

Periode berakhirnya Rencana Strategis Kota Samarinda sama dengan berakhirnya periode berakhirnya RPJMD, dimana masa Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda 2016-2020 berakhir pada akhir tahun 2020. Dokumen Renstra Dinas Perdagangan tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra dan RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 - 2021

No	Indikator	Satuan	Penjelasan		Target								Sumber Data	
					Realisasi		Target							Kondisi Akhir 2021
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	%	Retribusi di Bidang Perdagangan juga berkontribusi pada peningkatan PAD Kota Samarinda	Jumlah Retribusi Di Bidang Perdagangan tahun N dikurang Jumlah Retribusi tahun N-1 dibagi Jumlah Retribusi tahun N-1 dikali 100	4,20%	33,34%	5,12%	8,19%	0,79%	4,20%	4,20%	Dinas Perdagangan Kota Samarinda		
2.	Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	%	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha tahun N dikurang Jumlah Pelaku Usaha N-1 dibagi Jumlah pelaku Usaha tahun N-1 dikali 100	-0,22%	6,32%	11,28%	5,69%	6,38%	2,11%	2,11%	Dinas Perdagangan Kota Samarinda		
3.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	%	Pertumbuhan nilai ekspor merupakan tolak ukur peningkatan komoditi ekspor unggulan daerah (RPJPD)	Jumlah Nilai Ekspor Bersih tahun N dikurang Jumlah Nilai Ekspor Bersih tahun N-1 dibagi Jumlah Nilai Ekspor Bersih tahun N-1 dikali 100	(14,04)	36,96	(14,40)	2,54	2,60	2,67	2,67	BPS		

No	Core business (fungsi utama, Penyangkal Dasar).	Permasalahan	Isu Strategis	Visi	Misi	Prioritas	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Satuan	Target Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Target Sasaran						Sumber Data	
											Awal Tahun 2016	Akhir Tahun 2021				Alasan	Formulasi	Realisasi 2016	2017	2018	2019	2020	2021		Kondisi Akhir 2021
		Kurangnya Penguasaan Esplorasi Konvensional Unggulan Nasional											Meningkatkan Perolehan Nilai Esplorasi Konvensional Berbasis Perolehan		%	Pertumbuhan nilai ekspor perolehan blok ukur ekspor (perolehan dalam (Rp/RPD)	Jumlah Nilai Esplorasi Konvensional Berbasis Perolehan tahun N-1 dikurangi Jumlah Nilai Esplorasi Konvensional Berbasis Perolehan tahun N-1 dikali 100	(14,04)	36,96	(14,40)	2,54	2,60	2,67	2,67	BPS

MATRIK REVISI DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2016 - 2021

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (OUTPUT)	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
																2016	2017	2018	2019
			Pasar menuju kelas pasar kelas menengah	Jumlah Pasar Menuju Kelas Pasar Sehat	Jumlah Pasar Menuju Kelas Pasar Sehat	0		0		0		1		1		2		2	
			Peningkatan/Revisi/Revisi Pasar	Jumlah Pasar yang dibangun/Revisi	Pasar	1		2		3		8		10		12		12	
			Presentase dokumen dan perbandingan yang dihasilkan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan Target Jumlah Dokumen Data Pendayaguan dasar 100	Presentase	0		0		0		100		100		100		100	

MATRIK REVISI DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2016 - 2021

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (OUTPUTS)	Formulasi	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Kondisi Akhir 2021
		Program Penunjang Kelembagaan Sumber daya Aparatur	Persentase aparatur yang dilaksanakan	Umbul aparatur yang dilaksanakan	persen	0		0		0		100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	1.320.000.000
		Program Penunjang Sistem Paiporan Cabaan Kenaja dan Keunggulan	Nilai evaluasi	Hasil evaluasi	Nilai	Na		62,00		62,00		65,00	150.000.000	68,00	150.000.000	71,00	150.000.000	71,00	450.000.000

Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/PUP)	Formula	Satuan	Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Mendukung						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
				2019		2020		2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
45	46	47	54	55	56	57	58	59	60	61	
Operasional & Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Pagi	Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Pagi	Jumlah Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Pagi	Ratibus	0	-	2.659.000.000	400.000.000	2.744.000.000	500.000.000	UPTD Pasar Pagi	Kota Samarinda
Operasional & Peningkatan Kinerja UPTD Cita Niaga	Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Cita Niaga	Jumlah Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Cita Niaga	Ratibus	0	-	200.000.000	400.000.000	210.000.000	500.000.000	UPTD Cita Niaga	Kota Samarinda
Operasional & Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Segiri	Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Segiri	Jumlah Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Segiri	Ratibus	0	-	2.465.000.000	400.000.000	2.525.000.000	500.000.000	UPTD Pasar Segiri	Kota Samarinda
Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Cita Niaga	Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Cita Niaga	Jumlah Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Cita Niaga	Ratibus	200.000.000	320.000.000	0	-	0	-	UPTD Cita Niaga	Kota Samarinda
Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Segiri	Jumlah Ratibus Pasar /Pakar Pasar yang dihasilkan UPTD Pasar Segiri	Ratibus	2.435.000.000	320.000.000	0	-	-	-	UPTD Pasar Segiri	Kota Samarinda
Optimalisasi Peningkatan Oupak Ratibus Pasar	persentase pencapaian target pendapatan Ratibus Pasar	Jumlah Pendapatan Ratibus Pasar dibagi Jumlah target Pendapatan Ratibus Pasar dikali 100	%	100	175.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	Seksi Perencanaan dan Pengembangan	Kota Samarinda
Peningkatan Administrasi Pemantauan Peningkatan Pasar	Laporan Pengelolan administrasi keuangan pendapatan	Jumlah Laporan Pengelolan administrasi keuangan pendapatan	Dokumen	0	-	2	350.000.000	2	350.000.000	Seksi Perencanaan dan Pengembangan	Kota Samarinda
Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan	Laporan Hasil Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan	Dokumen	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Kota Samarinda
Peningkatan sarana prasarana pedagang Informal	Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	Unit	30	960.000.000	30	960.000.000	30	960.000.000	Seksi Bina Usaha Perdagangan	Kota Samarinda
Peningkatan melalui upaya pengembangan keterampilan duna usaha	Terdapatnya pedagang	Jumlah Pedagang yang duna	Pedagang	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	Seksi Bina Usaha Perdagangan	Kota Samarinda
Regulasi /Kajian Bidang Perdagangan	Regulasi /Kajian Di Bidang Perdagangan	Jumlah Regulasi /Kajian Di Bidang Perdagangan	Regulasi /Kajian	0	-	2	100.000.000	1	100.000.000	Seksi Perencanaan dan Pengembangan	Kota Samarinda

Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/PUP)	Formula	Sasaran	Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pembiayaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangku Jawab	Lokasi Kegiatan
				2019			2020			2021				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Kebijakan Pasar Kaca Saminda	Adat kebiasaan dan Permisah Pasar	Jumlah Adat kebiasaan dan Permisah Pasar	Adat kebiasaan dan Permisah Pasar	4	250.000.000	7	600.000.000	7	600.000.000	Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Kaca Saminda			
Pembangunan IPAL Pasar Kaca Saminda	IPAL Pasar	Jumlah IPAL Pasar Yang Dibangun	IPAL	0	-	2	600.000.000	2	600.000.000	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan	Kaca Saminda			
Pembangunan Pasar Kaca Saminda	Pasar yang dipelihara	Jumlah Pasar yang dipelihara	Pasar	1	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan	Kaca Saminda			
Perencanaan prasarana dan prasarana perdagangan	Dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Dokumen	3	75.000.000	6	350.000.000	4	250.000.000	Seksi Perencanaan dan Pengembangan	Kaca Saminda			
Peningkatan dan Revisiasi Pasar Kawali (DAK)	Pasar yang dibangun / direvisiasi	Jumlah pasar yang dibangun / direvisiasi	Pasar	2	3.000.000.000	1	1.500.000.000	2	3.000.000.000	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan	Kaca Saminda			
Revisiasi Sarana dan Prasarana Pasar	Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Yang Direvisiasi	Pasar	3	500.000.000	4	600.000.000	3	600.000.000	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan	Kaca Saminda			
Revisiasi Sarana dan Prasarana Pasar (MBT)	Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Yang Direvisiasi	Pasar	3	6.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan	Kaca Saminda			
Evaluasi Monitoring Perencanaan Pasar dalam Wilayah Kota Saminda	Laporan Evaluasi, Monitoring Perencanaan Pasar dalam Wilayah Kota Saminda	Jumlah buku laporan penelitian dan pengembangan pasar	Dokumen	1	100.000.000	0	-	0	-	Seksi Monitoring dan Evaluasi	Kaca Saminda			
Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang perdagangan	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan di aplikasi	Aplikasi	2	267.565.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kaca Saminda			
Pemetaan data dibidang perdagangan	Kecamatan yang data	Jumlah Kecamatan yang data	Kecamatan	3	300.000.000	3	300.000.000	4	400.000.000	Seksi Bina Usaha Perdagangan	Kaca Saminda			
Profil Pedagang Pasar Kota Saminda	Dokumen Profil pedagang	Jumlah buku Profil pedagang	Dokumen	0	-	0	-	1	300.000.000	Seksi Monitoring dan Evaluasi	Kaca Saminda			
Pendaftaran Pasar Mahan Kota Saminda	Dokumen data pedagang pasar melalui skala Saminda	Jumlah Dokumen data pedagang pasar melalui skala Saminda	Dokumen	0	-	1	250.000.000	1	250.000.000		Kaca Saminda			
Pengadaan Pevlayan Perdagangan	Stok Harga dan Stok Barang	Jumlah Stok Harga dan Stok Barang	Stok	5	300.000.000	6	200.000.000	7	200.000.000	Seksi Pengendalian Bahan Pakok Strategis	Kaca Saminda			
	Peleaksanaan Pasar Murni	Jumlah Peleaksanaan Pasar Murni	Lokasi	8		10		12						
	Pengadaan Data Rebas	Jumlah Dokumen Data rebas Binaan	Dokumen	12		12		12						
	Pengadaan data harga dan stok	Jumlah Dokumen Data Harga dan Stok Binaan	Dokumen	12		12		12						
Evaluasi Monitoring Perencanaan Kegiatan Perdagangan dalam Wilayah Kota Saminda	Laporan Evaluasi, Monitoring Perencanaan Kegiatan Perdagangan dalam Wilayah Kota Saminda	Jumlah Laporan Evaluasi, Monitoring Perencanaan Kegiatan Perdagangan dalam Wilayah Kota Saminda	Dokumen	0	-	2	300.000.000	2	300.000.000	Seksi Monitoring dan Evaluasi	Kaca Saminda			

Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/PUP)	Formula	Satuan	Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pembiayaan						Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
				2019		2020		2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Pemerian dan pengawasaan terhadap penguasaan alat Ukur Pasir Terasang dan Pasir Terbangnya (UFTP)	Alat UFTP yang dewasa	Jumlah Unit Alat Ukur Pasir Terasang dan Penguasaan UFTP yang dewasa	Alat UFTP	3000	150.000.000	3500	250.000.000	4000	400.000.000	UPPT Meridagi Legal	Kota Samudra
				Darah Terah Ukur	0	-	1	1.500.000.000	0	-	Kota Samudra
Pembentukan Daerah	Daerah Terah Ukur	Jumlah Daerah Terah Ukur	Unit	0	-	5	500.000.000	5	500.000.000	Kota Samudra	
				Alat UFTP	0	-	5	500.000.000	5	500.000.000	Kota Samudra
Peningkatan sama dan pusrana kerendogian (Dak Bidang Pasar)	Alat UFTP	Jumlah set alat UFTP yang diadakan	Set	0	-	5	500.000.000	5	500.000.000	Kota Samudra	
				Operasional dan pemeliharaan kerendogian	Rata-rata yang di hasilkan Bidang Kerendogian	Jumlah Rebutan yang di hasilkan Bidang Kerendogian	Rata-rata	350.000.000	450.000.000	250.000.000	500.000.000
Perindungan Konsumen	Peaku Usaha Dawasi	Jumlah Peaku Usaha Yang Dawasi	Peaku Usaha	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	Seksi Peningkatan Konsumen	Kota Samudra
				Koordinasi dan Fasilitas Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dukungan Koordinasi dan Fasilitas Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Jumlah Dukuman Koordinasi dan Fasilitas Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dukuman	8	75.000.000	8	100.000.000
Evaluasi, Monitoring, dan Peliboran Kegiatan Karbit	Iaporan situasi dan kondisi karbit dirangkung pasar	Jumlah Iaporan situasi dan kondisi karbit dirangkung pasar	Iaporan	1	50.000.000					Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Kota Samudra
				Peningkatan perdagangan luar negeri	komodi ekspor unggulan daerah	Jumlah komodi ekspor unggulan daerah	Komoditi	1	150.000.000	1	400.000.000
Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Peaku Usaha	Jumlah peaku usaha	Orang	0	-	10	500.000.000	10	500.000.000	Seksi Perdagangan Luar Negeri	Kota Samudra
				Nilai Ekspor	Nilai Ekspor	Jmla (US \$)	4.185.56	4.294.37	4.408.03		
Promosi Dagang Nasional dan Internasional	Pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Kali	3	150.000.000	0	-	0	-	Seksi Promosi dan Iklan Usaha	Kota Samudra
				Promosi Dan Pelabasi Prodak Dagang Nasional dan Internasional	Pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Kali	0	-	5	500.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Jumlah Bakti pembayaran	Bakti pembayaran	12	400.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	Sisa Bagian Umum	Kota Samudra
				Peyediaan Alat - Alat Tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis-jenis alat tulis kantor yaitu: alat tulis kertas, buku, file organizer, pensilahan mmn)	Jenis	5	20.000.000	12	20.000.000

Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/PUP)	Formula	Satuan	Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pembiayaan						Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
				2019		2020		2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Jumlah laporan realisasi anggaran triwulan yang dicetak atau digandakan	Dokumen	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	Kada Samarinda	
Penyediaan komponen instalasi listrik / pererangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan pererangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan pererangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Kada Samarinda	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	2	150.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	Kada Samarinda	
Rapat/rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri yang koordinator dibagi jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang mampu dihadiri oleh anggaran dikali 100	persen	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Kada Samarinda	
Penyediaan jasa administrasi dan perkantoran	PTTB serta Pengola Keuangan dan Barang yang diwujudkan honorariumnya.	Jumlah PTTB serta Pengola Keuangan dan Barang yang diwujudkan honorariumnya.	orang	295	7.000.000.000	295	7.000.000.000	295	7.000.000.000	Kada Samarinda	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan dibagi jumlah makanan dan minuman yang disediakan yang mampu dihadiri oleh anggaran dikali 100	persen	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	Kada Samarinda	
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	Jumlah gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara dibagi jumlah T target gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara dikali 100	persen	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kada Samarinda	
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dibagi jumlah target kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dikali 100	persen	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Kada Samarinda	
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor yang dipelihara	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara dibagi jumlah target perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara dikali 100	persen	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Kada Samarinda	
Pengadaan Pakaian Dinas besaran kelompokan	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas besaran kelompokannya	Jumlah Aparatur yang memperoleh pakaian dinas besaran kelompokannya	Orang	475	190.000.000	475	190.000.000	475	190.000.000	Kada Samarinda	

Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/PUP)	Formulasi	Satuan	Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
				2019		2020		2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Peningkatan SDM dan Penataan pengambilan administrasi	Aparatur yang diklasifikasi berdasarkan	Jumlah Aparatur yang diklasifikasi berdasarkan	Orang	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000		Kab Samudra
Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP terdiri atas : Kearsifan, KKI, Perijinan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP	Dokumen	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab Samudra